

# OSIS

MENDAYUNG DI ANTARA DUA  
KARANG : KEBIJAKAN SEKOLAH,  
RADIKALISME DAN INKLUSIVISME  
KEBANGSAAN



# OSIS

MENDAYUNG DI ANTARA DUA  
KARANG : KEBIJAKAN SEKOLAH,  
RADIKALISME DAN INKLUSIVISME  
KEBANGSAAN

Policy Development for Improving Student Council (OSIS) at High School Level  
MAARIF Institute – PPIM UIN Jakarta – UNDP Indonesia

# CONVEY REPORT

OSIS Mendayung di Antara Dua Karang: Kebijakan Sekolah, Radikalisme, dan Inklusivisme Kebangsaan

Vol. 1 | No. 4 | Tahun 2018

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; MAARIF Institute; UNDP Indonesia

Tim Penulis: Muhd. Abdullah Darraz, Zuly Qodir

Tim Peneliti: Abdul Aziz Muslim, Anis F. Fuadah, Benni Setiawan,  
M. Hafizh Ghazali, Nikmatullah Syarif, dan Saefuddin Zuhri

Editor: Pipit Aidul Fitriyana

Layouter: Deni Murdiani

Penerbit:

MAARIF Institute for Culture and Humanity

Jl. Tebet Dalam 2 No. 6

Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telepon : 021-83794554

Email : [maarif@maarifinstitute.org](mailto:maarif@maarifinstitute.org)

Website : [maarifinstitute.org](http://maarifinstitute.org)

## DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG.....	6
II. FOKUS KAJIAN, TEORI DAN METODOLOGI .....	10
III. OSIS DI PERSIMPANGAN JALAN: KONTESTASI ANTARA RADIKALISME DAN MODERATISME.....	14
IV. KUASA NEGARA YANG DIABAIKAN: KEBIJAKAN YANG DIDISTORSI .....	21
V. KERENTANAN DAN LEMAHNYA DAYA TAHAN ...	26
VI. PRAKTIK TERBAIK PENGUATAN KEHIDUPAN KEBINEKAAN DI SEKOLAH .....	29
VII. Mencari Model Ketahanan dari Kasus-kasus di Sekolah .....	33
VIII. PETA AKTOR PENGUATAN SIKAP INKLUSIF .....	37
A. Peran Negara Menumbuhkan Nasionalisme	37
B. Peran ormas Islam Moderat (Muhammadiyah dan NU).....	38
C. Pengurus OSIS dan Hegemoni Alumni.....	40
IX. KESIMPULAN .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	44
PROFIL PENULIS .....	48
PROFIL MAARIF INSTITUTE .....	50

## I. LATAR BELAKANG

Pasca reformasi, penyebaran radikalisme di Indonesia mulai gencar memasuki lembaga pendidikan formal, baik sekolah<sup>1</sup> maupun perguruan tinggi.<sup>2</sup> Gerakan kelompok radikal telah memengaruhi bahkan menguasai beberapa institusi pendidikan umum negeri setingkat SMA. Infiltrasi ke SMAN ditengarai akibat diskursus keagamaan yang cenderung lebih lemah dibanding dengan sekolah-sekolah keagamaan seperti pesantren atau madrasah. Dimana pemahaman pelajar SMAN tentang ajaran Islam jauh dari utuh. Berbeda dengan pelajar dari pesantren yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ajaran-ajaran Islam, seperti pemahaman tentang al-Qur'an, hukum dan sejarah Islam.<sup>3</sup> Akibat infiltrasi gerakan radikal ini, muncul gejala sekolah-sekolah menengah atas negeri menjadi pusat persemaian intoleransi, eksklusivisme, anti-kebinekaan, bahkan kekerasan dalam berbagai bentuk.<sup>4</sup>

Fenomena ini terkonfirmasi secara jelas melalui berbagai hasil riset beberapa tahun terakhir. Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada 2010 menunjukkan bahwa 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan kesetujuannya terhadap aksi radikal. Hasil survei dari Wahid Foundation (2016) yang menunjukkan sebanyak 60 persen aktivis Rohis

---

1 Lihat Muhd. Abdullah Darraz, "Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan", Jurnal MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Vol. 8, No. 1, Juli, 2013, h. 154-173.

2 Lihat M. Zaki Mubarak, "Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keberagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", Jurnal MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Vol. 8, No. 1, Juli, 2013, h. 192-217.

3 Dina Afrianty, "Indonesia's Islamic Educational Institution and Radicalism among Muslim Youth", makalah disampaikan pada Seminar Asian Law Centre/Center for Islamic Law and Society di the University of Melbourne.

4 Lihat Farha Ciciek, *Merawat Tradisi Moderat Kaum Muda*, makalah tidak diterbitkan, 2008; Lihat juga MAARIF Institute, *Laporan Riset Pemetaan Radikalisme di SMU Negeri*, 2011.

dari 1.626 responden, bersedia berjihad ke wilayah konflik seperti Poso dan Suriah, 10 persen mendukung Serangan Bom Sarinah, dan 6 persen mendukung ISIS.

Dalam pemetaan awal tulisan ini, setidaknya ada 3 hal utama, bagaimana radikalisasi terjadi di sekolah-sekolah menengah atas, khususnya SMA Negeri dan Madrasah Aliyah. *Pertama*, indoktrinasi yang dilakukan oleh guru ketika proses belajar-mengajar. Seperti yang dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran Sosiologi di sebuah sekolah di Surakarta. Dimana yang bersangkutan menyebarkan paham tentang jihad.<sup>5</sup> Penelitian MAARIF Institute pada tahun 2011 telah mengkonfirmasi temuan ini, ketika mendapati proses serupa yang dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran bahasa asing (Jerman) di sebuah sekolah di Cianjur, yang lokasinya berdekatan dengan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur. Dimana yang bersangkutan menyebarkan paham anti nasionalisme melalui doktrin khilafah dan negara Islam kepada para siswa. Hingga akhirnya buletin al-Islam tertempel di dinding-dinding sekolah.<sup>6</sup>

*Kedua*, infiltrasi pandangan keagamaan radikal yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di mana Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) menjadi jalur penting dalam proses regenerasi kelompok-kelompok radikal di sekolah-sekolah menengah atas negeri, utamanya melalui ekstrakurikuler kerohanian Islam (rohis) sebagai pintu masuknya. Pelatihan semi-militer "*Jundullah*" di Cianjur, yang menjurus pada praktik kekerasan atas nama agama (Farha Ciciek: 2008), dan mentoring-mentoring seperti *liqa* di Yogyakarta dan Sukabumi menggunakan modul yang muatannya mengandung nilai-nilai anti-Pancasila dan anti-kebinekaan (MAARIF Institute: 2011, 2017), merupakan dua contoh penetrasi ideologi ekstremisme-kekerasan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

*Ketiga*, lemahnya implementasi dan artikulasi terkait kebijakan yang menguatkan kebinekaan. Hal ini bisa disorot pada tiga lapis. Lapisan pertama di tingkat mikro adalah kebijakan internal sekolah yang di dalamnya bukan hanya tidak memiliki muatan penguatan kebinekaan dan berupaya secara aktif menghadang radikalisasi di sekolah, namun keberadaan kebijakan internal ini malah berjalan sebaliknya, yakni turut menyuburkan radikalisasi yang ada di sekolah. Sebagai contoh konkret,

---

5 Lihat Farha Ciciek, *Merawat Tradisi Moderat Kaum Muda*, 2008.

6 Lihat MAARIF Institute, *Laporan Riset Pemetaan Persoalan Radikalisme di SMU Negeri*, 2001.

pihak sekolah seringkali mengundang kelompok-kelompok radikal untuk menjadi narasumber pengajian bulanan yang telah menjadi kebijakan internal sekolah. Alih-alih memperkuat kebinekaan, seringkali mereka datang dengan materi pengajian yang secara ideologis bermuatan radikal, eksklusif, sektarian, anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan menolak NKRI karena dianggap sebagai negara *thogut*/kafir. Demikian yang terjadi di sekolah menengah atas negeri. Penting pula untuk melihat bagaimana madrasah aliyah merumuskan kebijakan terkait pembinaan kesiswaan di sekolah.

Lapisan kedua, di tingkat meso, kebijakan di tingkat pemerintah daerah yang cenderung diskriminatif dan anti kebinekaan. Di era otonomi daerah ini, institusi sekolah menengah atas berada di bawah koordinasi pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi. Banyak daerah telah menerapkan regulasi daerah dalam bentuk perda-perda syariah. Namun dalam kenyataannya, perda-perda syariah ini telah mendorong para pemangku kebijakan sekolah merumuskan regulasi sekolah yang diskriminatif. Sebagai contoh, di Kota Padang, Pandeglang dan Banyuwangi beberapa waktu terakhir ini telah menerapkan kebijakan diskriminatif dengan mewajibkan seluruh siswa (baik muslim maupun nonmuslim) untuk memakai jilbab. Di Banda Aceh, sebuah sekolah negeri menolak keberadaan siswa nonmuslim.

Lapisan ketiga, pada aspek makro, yakni kebijakan dan/atau peraturan di level pusat. Hasil penelitian MAARIF Institute (2017) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penguatan kebinekaan dan inklusivitas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti) tidak dapat diimplementasikan dan diartikulasikan secara maksimal di tingkat sekolah. Padahal jika kebijakan tersebut diimplementasikan dan diartikulasikan dengan baik akan mampu membentengi para siswa dari pandangan yang radikal.

Kendati kementerian memberikan panduan untuk kedua Peraturan Menteri tersebut, pihak sekolah mempunyai keistimewaan untuk menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti yang telah disinggung di awal, kondisi ini semakin diperparah dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah. Semangat otonomi daerah ini pada praktiknya sangat memengaruhi cara pandang dunia pendidikan di daerah masing-masing.

Berdasarkan analisis kontekstual tersebut, upaya membendung arus radikalisme di sekolah menengah atas dan madrasah aliyah dilakukan dengan upaya memperkuat kebijakan yang mempromosikan pandangan-pandangan yang inklusif dan pro-kebinekaan di level sekolah, dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah Kemenag tingkat provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Selain itu, perlu juga dimaksimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi atas jalannya kebijakan tersebut.

Lemahnya kebijakan internal sekolah dalam upaya membendung radikalisme turut menjadi faktor pendorong masifnya arus radikalisme yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Selain itu, peran guru sebagai pengajar-pendidik atau penyalur pengetahuan, utamanya dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, belum memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk menjadi benteng pertahanan ideologi kebangsaan yang disemai di kalangan siswa selama proses pembelajaran di kelas.

Keterbatasan pengetahuan keagamaan yang didapatkan siswa di sekolah, ditambah hasrat ingin tahu yang besar, dimanfaatkan sebagai peluang oleh jaringan radikalisme untuk menginfiltrasi siswa dengan pengetahuan agama yang bernuansa kekerasan dan radikalisme. Padahal seharusnya keberadaan OSIS mampu membendung arus radikalisme di sekolah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menyelenggarakan kegiatan dan membangun pengetahuan yang positif dalam upaya menangkal ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme di sekolah.

Bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PPIM – UIN Jakarta) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, MAARIF Institute melakukan penelitian terkait potensi bahaya radikalisme sekaligus daya tahan di tubuh OSIS serta asesmen terhadap kebijakan yang terkait dengannya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

## II. FOKUS KAJIAN, TEORI DAN METODOLOGI

Kajian ini berfokus pada kebijakan tentang kegiatan ekstrakurikuler OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang merupakan organisasi resmi intra sekolah yang mendapatkan mandat dari UU Pendidikan untuk menjadi wadah aktivitas siswa di sekolah guna membentuk karakteristik siswa. Kebijakan yang dimaksud adalah regulasi-regulasi yang memengaruhi cara pandang dan pengelolaan OSIS di sekolah. Secara operasional, kebijakan dapat diindikasikan dengan empat poin sebagai berikut: (1) Keputusan atau peraturan dari pemerintah pusat dan daerah seperti Keppres, Permen, SK Dinas, Pergub, dan Perda; (2) Aturan-aturan hasil rapat warga sekolah; (3) Kesepakatan bersama terkait hal insidental; dan (4) Kebiasaan melalui kultur yang menghegemoni.

Kajian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana dinamika antara kehidupan kebinekaan dan inklusivitas di dalam sekolah terkait dengan tumbuhnya pandangan radikal dan kerentanan masuknya radikalisme di dalam sekolah. Tesis awalnya adalah, radikalisme akan dengan mudah masuk di lingkungan sekolah ketika sikap inklusif dan realitas kebinekaan tercerabut dari kehidupan sekolah. Dan sebaliknya, ketika kultur kebinekaan dan sikap inklusif tumbuh subur, maka proses radikalisasi akan dengan mudah untuk dibendung dalam komunitas sekolah.

Secara konseptual, yang dimaksud dengan kebinekaan mengacu pada sasanti *Bhinneka Tunggal Ika* dalam *Sutasoma* karya Mpu Tantular. Dengan berpedoman pada sasanti ini, kebinekaan yang dimaksud adalah sebuah kondisi yang utuh dengan agama, adat istiadat, warisan sejarah yang plural yang diharapkan akan bertahan lama, dengan syarat harus dihormati dan tidak pernah dikhianati oleh siapapun. Adapun secara operasional, kebinekaan diindikasikan dengan tiga poin berikut: (1) Rekognisi sebagai aspek keberterimaan, di antaranya meliputi akses terhadap layanan pendidikan, akses untuk kaum difabel, akses terhadap fasilitas tempat ibadah, praktik yang membatasi kelompok tertentu, dan pemaksaan sebuah nilai berdasarkan keyakinan tertentu; (2) Representasi sebagai aspek politik, di antaranya meliputi keterwakilan di OSIS dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan OSIS; dan (3) Redistribusi sebagai aspek sosial-ekonomi, di antaranya meliputi akses mendapatkan dana sekolah dan akses mendapatkan beasiswa.

Sementara inklusif yang dimaksud adalah sifat akomodatif terhadap hal lain yang memungkinkan terbukanya pandangan dan sikap terhadap hal lain yang berbeda, dengan cara: (1) memandang secara positif terhadap perbedaan; dan (2) membangun kerjasama dengan orang atau kelompok yang berbeda demi mencapai tujuan bersama.

Radikalisme ialah paham aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Dalam kamus politik (Marbun, 2003), radikal diartikan amat keras menuntut perubahan yang menyangkut undang-undang dan ketentuan pemerintah. Radikal juga sinonim dengan: fundamental, mendasar, primer, esensial, ekstrem, fanatik, keras, revolusioner, progresif, liberal, reformis, dan seterusnya (Endarmoko, 2006). Dalam ensiklopedia Indonesia, radikalisme adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrem, setidak-tidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut.

Untuk menjelaskan fenomena radikalisme di OSIS, dalam kajian ini digunakan kerangka radikalisme yang disampaikan oleh Martin F. Marty (1992). Radikalisme sering disamakan dengan istilah fundamentalisme yakni suatu fenomena sosial (politik, ekonomi dan keagamaan) yang bersinggungan dengan masalah-masalah ideologi atau pun tindakan yang bersebrangan dengan apa yang terlihat selama ini hendak diubahnya. Marty kemudian memberikan beberapa ciri dari radikalisme-fundamentalisme yakni; mereka yang menolak sistem yang sedang berlangsung, sehingga perlu adanya perubahan secara mendasar disebabkan adanya anggapan yang tidak sesuai dengan gagasan/pikiran yang dianut; tidak bersedia melakukan interpretasi atas teks keagamaan yang tersedia, sebab interpretasi dianggap akan mengaburkan serta mengacaukan teks itu sendiri, sehingga harus dilihat secara tekstual apa adanya; bersifat oposisional atas mereka yang memiliki pemikiran dan sikap berbeda dengan pandangan yang dianut; dan terakhir adalah jika dimungkinkan maka perlu mengambil alih sistem ekonomi-politik dan paham keagamaan yang sedang terjadi dengan yang diyakini kaum fundamentalis-radikal.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2016) mengidentifikasi beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain),

2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Mengacu pada sumber di atas, maka radikalisme dapat diartikan sebagai aliran, paham, atau pandangan yang menginginkan perubahan sosial dan politik sesuai dengan keyakinannya melalui cara-cara kekerasan.

Sementara itu, Jürgen Habermas (2015), memberikan penjelasan yang menarik terkait dengan intoleransi dan diskriminasi di ruang publik. Dalam kajiannya, intoleransi dan diskriminasi dimulai dari persoalan adanya perasaan alienasi sistem, ruang publik dan perilaku-perilaku yang tampak meminggirkan, mendiskreditkan atas kelompok tertentu sehingga seseorang atau kelompok akhirnya hendak memberikan respon dari bentuk intoleransi dan diskriminasi yang dialaminya dari yang lunak sampai yang keras. Hal ini berlaku sama dengan kelompok intoleran ataupun melakukan perlawanan radikal.

Kenyataan seperti itu semakin memprihatinkan. Pendidik dalam hal ini guru, utamanya para guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, belum menunjukkan kemampuan yang cukup dalam berperan sebagai pendidik untuk memantapkan ideologi kebangsaan serta menyebarkan paham keagamaan yang inklusif dan toleran yang sudah semestinya terjadi dalam proses pembelajaran di kelas.<sup>7</sup> Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa minimnya pengetahuan para pendidik-pengajar dan pimpinan sekolah tentang peta gerakan eksklusif serta radikal, menyebabkan pandangan dan sikap membiarkan dari pimpinan sekolah terhadap berbagai aktivitas jaringan gerakan radikal melalui kegiatan sekolah terhadap para siswa. OSIS, sebagai salah satu wadah kegiatan ekstrakurikuler siswa sekolah, berpotensi menjadi jalan infiltrasi ideologi radikal dan pemahaman keagamaan yang beorientasi kekerasan.<sup>8</sup>

Semua proses semacam ini pada gilirannya menjadi faktor signifikan bagi melemahnya mekanisme sekolah melawan penyebaran ideologi radikalisme dan kekerasan. Jika tidak diambil langkah kebijakan yang lebih

---

7 Salah satu yang membahas hal ini misalnya tulisan Muhd. Abdullah Darraz, "Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8, No. 1, Juli, 2013, h. 154-173.

8 Ringkasan Eksekutif Penelitian "Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan, MAARIF Institute, 2017.

komprehensif untuk mengarahkan kegiatan siswa di sekolah melalui OSIS, bukan tidak mungkin kegiatan pendidikan dan kebudayaan di sekolah akan turut memperlemah visi dan nilai-nilai kebangsaan yang majemuk di kalangan siswa, akibat dari kekeliruan memahami tugas, mandat dan fungsi OSIS.

Arti penting kajian ini terletak pada upaya menemukan fakta-fakta empiris tentang mekanisme masuknya ideologi dan pemikiran keagamaan intoleran-eksklusif dan radikal<sup>9</sup> di sekolah. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi dalam perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, sistematis dan implementatif untuk menangkal ideologi intoleran-kekerasan. Secara khusus dalam rangka merevitalisasi kebijakan pembinaan kesiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler (OSIS) dan memperkuat peran sekolah dalam mendeteksi secara dini berkembangnya jaringan dan organisasi intoleran-radikal melalui kegiatan keagamaan.

Dengan demikian, diharapkan rekomendasi kajian ini dapat mendorong munculnya inisiatif dan strategi dari pemangku kebijakan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan serta mendorong berkembangnya keadaban demokrasi bagi siswa. Demokrasi yang telah berkembang dengan cukup baik dan diharapkan banyak pihak tidak dikotori dengan perilaku-perilaku destruktif yang mencederai nilai-nilai substansi demokrasi di Indonesia, setelah beberapa negara di Timur Tengah kocar-kacir karena radikalisme.

Sementara itu, secara metodologis kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa kabupaten/kota sebagai wilayah riset. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam semi terstruktur. Penelitian berlangsung di enam kota dari lima provinsi di Indonesia, yakni Kota Padang (Sumatera Barat), Kab. Cirebon (Jawa Barat), Kab. Sukabumi (Jawa Barat), Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Denpasar (Bali), dan Kota Tomohon (Sulawesi Utara). Kabupaten/Kota ini dipilih dengan mempertimbangkan sebaran, tipologi dan karakteristik yang melekat dengannya.

---

<sup>9</sup> Penjelasan tentang intoleransi, eksklusivisme dan radikalisme dapat ditemukan dalam karangan Jurgen Habermas, *Intolerant and Discrimination*, 2011. Sage Publication, UK. Dalam karangannya, Jurgen Habermas menyatakan bahwa bibit-bibit intoleransi akan mengarah pada pemikiran eksklusiv serta akan berakhir pada gerakan radikal yang bermakna negative yakni melakukan tindakan dengan cara-cara destruktif pada pihak lain yang berbeda paham dan pemikiran (mazhab).

Dengan pertimbangan tersebut, dipilih 40 sekolah sebagai sampel terpilih penelitian (*purposive sampling*) dengan *clustering*. Sekolah yang dijadikan sampel hanya SMA/MA. Hal ini mengacu kepada temuan-temuan sebelumnya di mana banyak ditemukan indikasi intoleransi<sup>10</sup> di SMA di satu sisi, serta ingin melakukan pemetaan yang sama pada MA di sisi lain. Pemilihan sekolah ini sendiri didasarkan kepada kategori perkotaan-pedesaan, unggulan-non unggulan, dan homogen-heterogen.

Selama 20 hari pada 2-21 Oktober 2017, terdapat 440 orang informan sebagai narasumber yang diwawancarai terdiri dari pemangku kebijakan (kepala sekolah, wakasek bidang kesiswaan, dan guru pembina OSIS), penerima kebijakan (siswa pengurus dan bukan pengurus OSIS) dan pengawas implementasi kebijakan (komite sekolah serta pengawas sekolah untuk SMA dan MA). Selain narasumber tersebut, diwawancarai pula orang-orang yang dapat memberikan informasi tambahan berdasarkan informasi dari narasumber sebelumnya (*snowballing process*).

Data yang tersedia dalam kajian ini disajikan dalam kerangka *verstehen* (*interpretative*) atas masalah-masalah yang muncul di lapangan. Dari sana diharapkan kita mendapatkan apa yang menjadi konsentrasi OSIS dalam gerakan (aktivitas) sekolah, apa yang dilakukan sekolah, dan guru serta jejaring alumni ketika memberikan materi atau pengaruh pada anak-anak aktivis OSIS di sekolah. Tradisi *verstehen* merupakan tradisi dalam riset sosial humaniora untuk menjelaskan data yang bersifat ungkapan atau ujaran, atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh narasumber atau informan kepada peneliti lapangan. Dari sana kita berharap akan mendapatkan kumpulan makna atas apa yang dikemukakan selama pencarian data lapangan (*field research*) dan *desk study*-kajian literatur.

### III. OSIS DI PERSIMPANGAN JALAN: KONTESTASI ANTARA RADIKALISME DAN MODERATISME

Infiltrasi radikalisme di sekolah masuk melalui tiga pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan (kepala) sekolah. Ketiga pintu masuk ini dapat dibagi

---

10 Fathali Moghaddam, dengan menggunakan kajian psikologis, menggambarkan bagaimana seseorang mengalami transformasi menjadi teroris. Moghaddam mengkonseptualisasi bahwa tindakan terorisme adalah tahap akhir dari pikiran yang semakin menyempit. Dalam kajian MAARIF Institute, pikiran yang semakin menyempit ini dikategorikan sebagai intoleransi. Fathali Moghaddam, "The Staircase to Terrorisme", *American Psychologist*, February-March, 2005 Vol. 60, No. 2, h. 161-169.

berdasarkan aktor internal dan eksternal, dimana satu dan lainnya memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

OSIS, utamanya melalui bidang kerohanian, kerap disusupi alumni dan kelompok radikal. Di Kota Surakarta, Kab. Sukabumi, dan Kota Padang, alumni kerap menjadi rujukan utama pengurus bidang kerohanian dalam setiap kegiatannya. Misalnya, di sebuah SMA Negeri di Surakarta, alumni yang bercorak Salafi menjadi referensi utama bagi pengurus OSIS dalam kegiatan Studi Islam Intensif (SII), yang langsung dibina oleh ustadz dari sebuah Pesantren Salafi. Selain oleh Salafi, kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri tersebut juga dibina oleh alumni yang tergabung dalam Jamaah Masjid sebuah kampus negeri di Surakarta. Mereka membina dan menjadi mentor utama dalam kajian rutin hari Selasa dan Kamis.<sup>11</sup>

Di Kota Surakarta pula, jaringan alumni Rohis ada yang tergabung dalam sebuah Komunitas Remaja Ilmiah yang melakukan pendampingan pelajar, *training* dan pelatihan keislaman di Surakarta. Para aktivis di lembaga ini cukup dominan menjadi pembina Rohis di SMAN dan MAN. Lembaga ini menjadi wadah bagi para pengurus rohis yang memiliki corak ideologi Tarbiyah. Semua SMAN dan MAN di Surakarta, kecuali satu SMAN yang dibina oleh ustadz dari sebuah pesantren Salafi. Corak Tarbiyah inilah yang dominan dalam paradigma siswa di Surakarta. Jadi di Kota Surakarta terdapat dua corak yang mewarnai pandangan dunia pendidikan di sana, sekaligus berkontestasi dalam tubuh OSIS, yakni Salafi dan Tarbiyah. Salafi disini dimaknai sebagai organisasi dan gerakan yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya *salafus shalih* (kembali kepada zaman kenabian dan sahabat yang bercorak praktik-praktik tekstualis) era Nabi dan sahabat. Sedangkan Tarbiyah yang lebih dominan di Surakarta, lebih memberikan corak pada Ikhwanul Muslimin yang disebarkan oleh Sayyid Qutb dan Hasan al Bana, lebih bersifat pendidikan dan kaderisasi jamaah, karenanya lebih bersifat islamisme-politis.

Sementara itu di Kab. Sukabumi, beberapa alumni OSIS bidang kerohanian tergabung dalam Qur'anic Club (QC). QC didirikan oleh Bupati Kab. Sukabumi periode 2005-2015 sebagai wadah pembinaan akhlak pelajar di Kab. Sukabumi yang memiliki semboyan "Selamatkan Pewaris Negeri!". QC bercorak ideologi Tarbiyah. Pendirian QC disinyalir sebagai bentuk dari

---

<sup>11</sup> Laporan Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah". Kota Surakarta

realisasi kontrak politik antara Bupati dengan partai pengusungnya.

Selain terhimpun dalam QC, beberapa alumni OSIS bidang kerohanian di Kab. Sukabumi juga berjejaring dengan sebuah pesantren dan sekolah tinggi setingkat Diploma 2 yang berafiliasi pada Wahabi Saudi. Kampus ini mengajarkan bahasa Arab, ilmu-ilmu keislaman, dan juga propaganda anti kebinekaan. Para alumni terhubung dengan yayasan karena melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi tersebut. Sejauh ini, melalui peran mahasiswa dan lembaga pengabdian masyarakat, mereka menyebarkan pandangan keagamaannya di daerah Cikembar dan Cibadak, dua kecamatan yang heterogen di Kab. Sukabumi.

Temuan menarik lainnya di Kab. Sukabumi adalah pengaruh kelompok *vigilante* berbasis keagamaan kepada siswa yang menjadi “santri kalong” di pesantren salaf (tradisional). Ekses yang paling terasa dari organisasi yang kerap dilabeli sebagai ormas garis keras ini adalah mobilisasi massa aksi untuk demo Aksi Bela Islam di Jakarta pada penghujung 2016 lalu. Keberangkatan para siswa ke Jakarta dalam rangka Aksi Bela Islam ini juga turut difasilitasi oleh pesantren dan/atau sekolah. Terlepas dari Aksi Bela Islam, kelompok ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa karena nilai solidaritas, militansi, ketegasan, dan berkah dari ulama (habaib)-nya.

Sejauh ini, memang tidak ditemukan indikasi radikalisme yang mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan (*violent-extremism*) di tubuh OSIS di Kab. Sukabumi. Namun pandangan mereka diwarnai oleh tiga corak yang berbeda tadi: Tarbiyah, Wahabi,<sup>12</sup> dan NKRI bersyariat. NKRI bersyariat adalah gagasan mengenai perlunya menerapkan hukum-hukum Islam melalui perda syariah dan islamisasi birokrasi. Pancasila tetap sebagai dasar negara namun yang diterapkan bukan hukum positif-pidana perdata.<sup>13</sup>

Pengaruh alumni juga turut dirasakan di Kota Padang. Sikap keberagaman bercorak Salafi yang sangat puritan<sup>14</sup> dan cenderung

---

12 Studi tentang infiltrasi gerakan transnasional di Indonesia, misalnya disinggung dalam *Ilusi Negara Islam: Gerakan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute-MAARIF Institute-Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, 2008.

13 Kelompok-kelompok yang mengusung penegakkan Syariat Islam ini dalam kajian Haedar Nashir dikenal dengan gerakan Islam Syariat. Lihat Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Mizan-MAARIF Institute, 2013).

14 Istilah puritan merujuk kepada pemikiran Khaled Abou el-Fadl dalam bukunya *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2007). Puritan sebagai absolutisme yang tidak mengenal kompromi dan cenderung murni (*pure*) dalam memandang berbagai realitas sosial dan tidak toleran atas pluralitas yang ada.

eksklusif mewarnai OSIS sebagai imbas dari indoktrinasi para alumni. Puritanisme ini lebih mewarnai keagamaan siswa yang ditarik pada adanya gagasan yang diambil dari Muhammad ibn Abdul Wahab dan Ibnu Taymiyyah, yang cenderung berkiblat kepada Arab Saudi. Corak puritanisme merupakan corak keislaman yang seringkali diidentifikasi sebagai gerakan dan pemikiran keislaman yang dekat dengan Muhammadiyah, karena menjauhkan pada hal-hal yang sifatnya disebut *bid'ah*, tidak ada rujukan dari Nabi dalam hal ibadah.

Warna lain juga terlihat akibat interaksi dengan beberapa ustadz dari pesantren. Salah satu pesantren yang dimaksud adalah pesantren yang memiliki lembaga pendidikan formal SMP dan SMA, serta mengklaim sebagai lembaga pendidikan agama terbaik di Kota Padang. Karakter keagamaan pesantren tersebut berpaham *Salafi Wahabi* dimana sebagian besar ustadznya alumni dari sebuah sekolah tinggi di Jakarta yang berlokasi di Jalan Buncit Raya, dan didirikan pada 1980-an, sebagai bagian dari cabang salah satu universitas di Timur Tengah. Secara politik, pesantren ini memiliki kedekatan dengan kelompok Tarbiyah.

Yang menarik untuk dicermati dari kelompok Tarbiyah ialah asosiasi-asosiasi yang dibuat untuk memwadahi para alumni Rohis. Keterlibatan kelompok Tarbiyah di kalangan siswa semakin terlihat melalui asosiasi OSIS (FON) dan Rohis (Assalam). Forum OSIS Nusantara (FON) merupakan sebuah asosiasi OSIS tingkat nasional yang memiliki asosiasi politik dengan kelompok Tarbiyah.<sup>15</sup>

Sedangkan Assalam merupakan sebuah Asosiasi Pelajar Islam yang menjadi tempat berhimpun aktivis Rohis se-Sumatera Barat. Assalam dibentuk oleh Lembaga Pembinaan Pelajar Muslim (LPPM) melalui Musyawarah Rohis SLTP dan SLTA se-Sumatera Barat tanggal 27 Oktober 1999 di Masjid Nurul Iman Kota Padang.<sup>16</sup>

Secara orientasi keagamaan, aktivis Assalam lebih dekat dengan kelompok Tarbiyah dan Salafi. Secara afiliasi politik, Assalam lebih dekat dengan kelompok Tarbiyah karena diampu oleh para aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Bahkan kegiatan-kegiatan Assalam difasilitasi oleh salah seorang seniornya dengan menggunakan tempat di lembaga bimbingan belajar yang diinisiasi oleh gerakan Tarbiyah.

---

15 Mengenai FON, bisa dilihat di <https://www.instagram.com/forumosisnusantara/?hl=id>. Diakses pada 30 Januari 2018.

16 Laporan Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" Kota Padang.

Para aktivis Assalam sempat melakukan aksi solidaritas untuk umat Islam di Suriah dengan cara melakukan pengumpulan dana kepada seluruh siswa lewat jejaring Rohis, dan menyalurkannya melalui Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS) yang berpusat di Jakarta. FIPS merupakan sebuah asosiasi yang memiliki kepedulian dengan menyalurkan bantuan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Syam (Palestina, Suriah, Libanon, dan Jordania). Beberapa tokoh pengurus FIPS selama ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki pemikiran puritanis, berpaham *Salafi Wahabi*. Seperti seorang ulama muda alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang aktif di Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI), dan seorang anggota Tim Pembela Muslim (TPM).

Dari ketiga daerah tersebut (Kota Surakarta, Kab. Sukabumi, dan Kota Padang), dapat dilihat geliat kelompok Tarbiyah di kalangan aktivis OSIS, utamanya melalui rohis. Di ketiga daerah tersebut, pola dakwah menggunakan model mentoring *liqo* dan *halaqah*. Keadaan ini semakin diperkuat dengan penggunaan media sosial oleh sebagian aktivis OSIS yang berujung pada grup pertemanan. Dalam grup-grup pertemanan yang diikuti, seringkali muncul postingan yang menstimulasi paham anti kebangsaan dan intoleransi pada siswa. Pengurus OSIS di beberapa sekolah di ketiga kota tersebut, membeberkan bahwa mereka sering mendapatkan postingan tersebut, dan meneruskannya kembali baik kepada individu maupun grup pertemanan yang lain.

Pada tahun 2015 GP Anshor Cirebon pernah merilis bahwa terdapat 2 sekolah yang siswanya terindikasi paham radikal. Kurang lebih 10 siswa diyakini mengikuti paham radikal dengan indikasi menolak untuk mengikuti upacara penghormatan bendera, menolak pelajaran sejarah, dan mengkafirkan gurunya sendiri. Mereka beralasan hal-hal tersebut adalah bagian dari *thogut*.

Tidak hanya itu, seorang ketua Rohis sebuah SMA Negeri Kota Cirebon juga pernah menolak mengikuti sholat berjamaah dengan siswa lainnya. Di saat yang sama, dia melakukan *tafarruq* (memisahkan diri) dengan mengkonsolidasikan para anggotanya untuk membentuk perkumpulan rohis tandingan, karena rohis yang dikelola OSIS dianggap tidak mengajarkan Islam secara benar. Bahkan dia juga tidak segan mengkafirkan (*takfiri*) siswa lain dan menuduh pemahaman agama yang diyakini tidak *kaffah* (menyeluruh, sempurna).

Bukan hanya di kalangan siswa, tapi radikalisme juga terjadi pada guru. Salah seorang Guru Bahasa Inggris di sekolah negeri di Kab. Cirebon diinformasikan menolak membayar iuran PGRI dengan alasan bahwa PGRI merupakan bagian dari sistem *thogut*.<sup>17</sup> Bahkan dia juga pernah mengirimkan siswanya yang nonmuslim untuk mengikuti pendidikan di sebuah pesantren Salafi karena tidak lulus mata pelajaran yang dia ampu.<sup>18</sup> Guru lain di MAN 2 Surakarta terbiasa mengajar sembari menyisipkan nilai anti-Syi'ah dan anti-Pancasila.<sup>19</sup>

Kebijakan (kepala) sekolah, karena ketidaktahuannya, seringkali membuka lebar pintu bagi kelompok intoleran dan radikal untuk membina OSIS bahkan membina siswanya dalam hal pemahaman keislaman. Di Surakarta, SMAN yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo, Nusukan, Banjarsari, menggandeng Pesantren Darus Syahadah, Simo, Boyolali, yang memiliki keterkaitan dengan Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo untuk melakukan pembinaan kesiswaan. Pesantren Darus Syahadah sendiri seringkali disebut sebagai Al-Mukmin yang asli karena masih memegang teguh prinsip dan ajaran Abdullah Sungkar sebagai pendiri Yayasan Islam Al-Mukmin.<sup>20</sup> Bahkan yang paling menyedihkan ketika kepala sekolah dan guru sekolah mempersilahkan kelompok-kelompok radikal ke sekolahnya dengan dalih untuk membina kegiatan keagamaan di sekolah. Hal ini sebenarnya memberikan gambaran betapa sekolah sangat rentan.

Catatan utama yang membedakan Cirebon dengan tiga kota sebelumnya (Kota Surakarta, Kab. Sukabumi, dan Kota Padang) adalah bahwa penyebaran paham radikal di kalangan Rohis tidak masuk melalui peran alumni, tapi murni melalui peran utama anggota kelompok radikal yang masuk ke sekolah. Kelompok radikal terhubung ke sekolah bisa melalui siswa atau pun langsung mendatangi sekolah. Dengan melakukan penyebaran pamflet dan kemudian melakukan kajian terhadap isi pamflet tersebut, salah satu kelompok ideologi radikal trans-nasional pernah mencoba masuk ke MAN dan SMAN di Cirebon. Upaya itu dilakukan oleh salah satu anggota kelompok Tarbiyah dan pengusung khilafah.

---

17 Wawancara dengan Koidah, Guru PAI dan Mantan Pembina Rohis SMAN 1 Plumbon Cirebon, 6 Oktober 2017.

18 Laporan Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" Kabupaten Cirebon.

19 Laporan Penelitian Kota Surakarta.

20 Laporan Penelitian Kota Surakarta.

Dari sini sebetulnya terlihat bahwa pola yang dilakukan di Kota Padang, Kab. Sukabumi, dan Kota Surakarta pun juga digunakan di Kab. Cirebon. Namun pola seperti ini tidak berjalan mulus karena ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkannya.

Selain itu, pintu masuk lainnya melalui keikutsertaan siswa dalam majlis taklim yang dikelola oleh pesantren yang dikenal mengajarkan ideologi radikal. Radikalisasi yang terjadi pada para siswa SMA Negeri di Kota Cirebon dimulai dari keikutsertaannya dalam kegiatan majelis taklim yang dikuatkan oleh dukungan orang tua.

Jika dilihat besar-kecil pengaruh proses radikalisasi ini, majelis taklim menduduki porsi terbesar pembentuk paham keagamaan pada siswa. Fenomena radikalisasi pada siswa sangat minim kaitannya dengan eksistensi Rohis, apalagi OSIS. Dan menurut banyak narasumber, di Cirebon tidak pernah ditemukan lagi indikasi radikalisme di sekolah sejak tahun 2015.

Perlu dicatat bahwa arus radikalisme yang terjadi di sekolah di beberapa daerah ternyata juga mendapatkan reaksi dan kontestasi dari kelompok keagamaan moderat. Misalnya kondisi tersebut ditemukan di Kab. Cirebon, dimana kelompok moderat sejauh ini memenangkan kontestasi tersebut.

Kontestasi yang terjadi, salah satunya, ketika Pembina Rohis di salah satu SMA didatangi oleh seorang muslimah dari kelompok radikal dengan membawa setumpuk kurikulum kajian tentang keislaman. Kurikulum tersebut berisi tentang kajian khilafah, khilafiyah, negara islam dan cara bergaul dalam Islam.<sup>21</sup> Kepada Pembina Rohis, beberapa kali ia memaksa ingin membantu sekolah melalui program kegiatan ekstrakurikuler Rohis. Upaya lain yang ditempuh ialah dengan cara mengirim hadith-hadith *dhoif* (lemah) ke *email* pribadi Guru Pembina Rohis. Ia memaksa bahwa jika tidak mau menerima tarwaran, maka akan dilaporkan ke kepala sekolah karena tidak mau membantu menegakkan nilai-nilai dan panji Islam. Alasan lain dengan meyakinkan bahwa pada tahun sebelumnya pernah dilakukan kajian serupa dan berhasil.

Situasi tersebut mendorong Guru Pembina Rohis melakukan advokasi dengan menggunakan jejaring lembaga di luar sekolah demi memotong embrio intoleransi. Akhirnya dibentuklah Pengurus Komisariat Ikatan Pelajar

---

21 Wawancara dengan Koidah, Guru PAI dan Mantan Pembina Rohis SMAN 1 Plumbon, 10 Oktober 2017

Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan tujuan memberikan intervensi kepada Rohis untuk memberikan nilai-nilai keterbukaan agar lebih inklusif. IPNU dan IPPNU dipilih karena Pembina Rohis tersebut merasa memiliki kesamaan visi dan misi dalam upaya menekan intoleransi dan radikalisme di sekolah. Selain itu, bentuk struktural dan kaderisasi yang dilakukan pun jelas, karena aktivis Rohis nantinya bisa melanjutkan ke tingkat cabang.

Pendirian Pengurus Komisariat IPNU dan IPPNU ini bukanlah hal yang mudah. Karena sempat ada guru yang tidak mendukung, hingga akhirnya kepala sekolah mengadakan rapat dan mengambil kebijakan untuk mendukung Pembina Rohis tersebut. Efeknya, Pembina Rohis tersebut dilabeli sebagai guru sekuler karena dianggap mengembangkan nilai-nilai sekularisme terhadap anak-anak Rohis.<sup>22</sup>

Namundukungan-dukungan seperti itu banyak berubah seiring dengan pergantian kepala sekolah. Inisiatif yang dilakukan untuk menghadirkan organisasi kepemudaan di sekolah kini tidak terdengar lagi gemanya. Di satu sisi karena kepala sekolah tidak memiliki konsen terhadap kegiatan ekstrakurikuler, dan di saat yang sama juga terjadi karena pergantian Pembina Rohis.<sup>23</sup>

#### **IV. KUASA NEGARA YANG DIABAIKAN: KEBIJAKAN YANG DIDISTORSI**

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Merujuk pada UU tersebut, pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Terkait dengan pembinaan kesiswaan, pemerintah pusat juga mengeluarkan regulasi berupa, *pertama*, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Permendiknas ini menjadi kebijakan awal yang berupaya menjadi pedoman dalam pengelolaan pembinaan kesiswaan (kegiatan ekstrakurikuler) di sekolah. Kendati di dalamnya hanya berisi tujuan, sasaran, ruang lingkup tanggung jawab, dan pendanaan,

<sup>22</sup> Koidah, *Potret Toleransi Rohis, IPNU dan IPPNU*. (Jakarta: MAARIF Institute, dalam proses terbit)

<sup>23</sup> Laporan Penelitian Kabupaten Cirebon.

namun sebagai awalan, materi (jenis kegiatan) pembinaan kesiswaan (kegiatan ekstrakurikuler) yang tertuang dalam lampirannya membantu sekolah untuk melaksanakan program-program pembinaan kesiswaan (kegiatan ekstrakurikuler).

*Kedua*, Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Di dalam Permendikbud ini terlihat upaya pemerintah pusat untuk menutupi dan mengkontekstualisasi regulasi terkait kegiatan ekstrakurikuler (pembinaan kesiswaan) yang ada sebelumnya. Utamanya pada pelibatan orang tua dan masyarakat sekitar. Di sini tidak disebutkan mengenai materi (jenis kegiatan) ekstrakurikuler (pembinaan kesiswaan) sebagaimana terlampir dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008. Yang disebutkan hanya contoh jenis kegiatan tanpa ada penekanannya. Dalam Permendikbud ini juga dimungkinkan sekolah menerjemahkan lebih jauh mengenai jenis kegiatan ekstrakurikuler (pembinaan kesiswaan) di tiap sekolah.

*Ketiga*, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Isi dari Permendikbud ini adalah ringkasan dari Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Tidak ada kebaruan dari Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini.

*Keempat*, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Pembiasaan-pembiasaan dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti di sekolah yang disebutkan dalam Permendikbud ini, baik kegiatan yang diwajibkan maupun contoh-contoh pembiasaan baik, sebagian mengulang materi (jenis kegiatan) kegiatan ekstrakurikuler (pembinaan kesiswaan) yang telah disebutkan dalam regulasi yang telah ada sebelumnya. Kebaruan dari Permendikbud ini sendiri adalah menekankan ulang kembali nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan yang dirasa pudar, dan pengembangan interaksi peserta didik dengan orang tua dan masyarakat.

*Kelima*, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Rohani Islam (Rohis) merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Disebutkan juga bahwa daerah/sekolah dapat menyesuaikan dan mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan, situasi, kondisi, dan potensi

masing-masing yang tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Namun tidak ada panduan khusus mengenai pelaksanaannya. Yang ada hanya disebutkan bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler PAI pada tingkat satuan pendidikan menjadi tugas dan tanggungjawab kepala sekolah, pengawas, dan guru PAI.

Ketidakhahaman pengabaian *stakeholder* lokal –baik itu Dinas Pendidikan dan banyak sekolah– terkait regulasi pembinaan kesiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler,<sup>24</sup> keleluasaan sekolah untuk menerjemahkan jenis kegiatan pembinaan kesiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler, dan ketiadaan panduan pengelolaan OSIS, mengakibatkan OSIS tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi demikian juga memicu kebijakan tentang kegiatan pembinaan kesiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler kontradiktif antara pusat dan daerah.

Situasi tersebut berimbas pada para pemangku kebijakan di tingkat daerah, juga sekolah, seringkali mereduksi penerjemahan kebijakan di tingkat pusat (terutama Peraturan Menteri) menjadi sebatas aspek keagamaan semata, dan bahkan dipersempit pada praktik ajaran dan pandangan keagamaan tertentu. Hal ini menurut mereka merupakan sebuah bentuk nyata penerjemahan dari program penguatan pendidikan karakter yang telah dicanangkan oleh negara sejak 2011. Lebih fatal dari itu, proses penerjemahan yang dilakukan seringkali menciptakan diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Sejak berlakunya otonomi daerah, kebijakan sekolah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Implikasinya, kebijakan-kebijakan tersebut hanya mengakomodir salah satu agama tertentu, yakni agama mayoritas yang dianut masyarakat. Di Kota Padang, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon, dan Kota Surakarta sangat diwarnai oleh pandangan agama Islam. Di Kota Denpasar oleh agama Hindu. Sementara di Kota Tomohon oleh agama Kristen.

Misalnya di Kab. Cirebon, dimana sekolah, yang akhirnya berdampak kepada OSIS, berlomba-lomba menjadi sekolah (OSIS) “Islami”. Maksud dari Islami ini terbagi menjadi beberapa makna, sesuai dengan konteks daerah dan kuatnya pengaruh masing-masing. Di Kab. Cirebon, “Islami” yang dimaksud bukanlah pemaksaan atas penerapan syariat murni, tapi bentuk

---

<sup>24</sup> Misalnya di Kab. Sukabumi, dari 6 sekolah yang dijadikan sampel penelitian, hanya wakasek MAN 1 Sukabumi (Cibadak) yang merespon cukup detail ketika ditanyakan regulasi-regulasi tersebut. Laporan Penelitian Kabupaten Sukabumi.

dari pengejawantahan ajaran Islam tradisional ala Nahdlatul Ulama. Di Kota Padang, “Islami” yang dimaksud bersifat puritan yang terkait dengan adat budaya lokal. Di Kab. Sukabumi “Islami” yang dimaksud adalah ajaran Islam tradisional (Salaf) menjadi yang paling dominan, yang turut diwarnai dengan ideologi Tarbiyah, Wahabi, dan NKRI bersyariat. Dan di Kota Surakarta, “Islami” yang dimaksud lebih kepada Salafi untuk satu SMAN dan Tarbiyah untuk sekolah lainnya.

Contoh dari pengelolaan OSIS “Islami” ini adalah penekanan untuk menghafal al-Qur’an dan membacanya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Di Kab. Cirebon dan Kab. Sukabumi, hal ini sangat dipengaruhi oleh Program Jabar Menghafal yang digulirkan oleh otoritas politik di daerah tersebut. Selain di kedua daerah tersebut, program hafalan dan membaca Qur’an ini sangat terealisasi di SMA-SMA di Kota Padang dan Kota Surakarta. Bahkan di Kota Padang diterbitkan Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2013 tentang Pendidikan Hafalan Al-Qur’an. Sejak diberlakukan keputusan ini, para siswa didorong lebih untuk menghafal al-Qur’an. Pemerintah memberikan insentif bagi siswa yang mampu menghafal dalam jumlah tertentu. Misalnya, siswa SMA yang hafal sekian juz bebas memilih PTN atau PTS di Kota Padang.

Berbeda dengan OSIS di SMA, OSIS di MA lebih berusaha mengimplementasikan materi pelajaran keislaman yang didapat di dalam kelas. Di sebuah Madrasah Aliyah Negeri di Cirebon misalnya, melalui Majelis Bina Dakwah (MBD), siswa dilatih untuk menguasai keterampilan berdakwah dan bagaimana menyampaikannya di tengah masyarakat. Selama tiga hari, siswa Kelas X anggota MBD diwajibkan untuk praktik kerja lapangan di kampung-kampung. Hal ini karena siswa, yang notabene santri di sekolah tersebut diyakini sudah mempelajari ilmu agama di pesantren masing-masing. Sedangkan di MA yang tidak bersentuhan langsung dengan pesantren, dihadirkan kegiatan OSIS dalam bentuk lain. Seperti pesantren tahfidz di beberapa madrasah di Cirebon dan Kota Denpasar, meskipun ada kalanya siswa mendapat beasiswa atau keuntungan tertentu seperti kebijakan di Kota Padang.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat pula kebijakan lainnya seperti Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Tahun 2006 dan 2009 dan Pembiasaan Akhlak Mulia yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Sukabumi; Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai

Baca Tulis bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan syarat bagi pelajar untuk melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama dan atas, Peraturan Walikota Padang No. 451.442/Binsos-iii/2005 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh dan Anti Togel/Narkoba serta Pakaian Muslimah bagi Siswi SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA; dan Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2013 tentang Pendidikan Hafalan Al-Qur'an seperti telah disinggung sebelumnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dipandang sangat diskriminatif dan tidak relevan bahkan tidak sesuai bila diterapkan di sebuah sekolah negeri yang sepatutnya bisa lebih terbuka pada realitas perbedaan dan kebinekaan. Sebagai contoh tentang penggunaan jilbab bagi seluruh siswi sekolah di Kota Padang. Meskipun awalnya tidak wajib bagi nonmuslim, akan tetapi pada praktiknya terjadi pemaksaan secara tidak langsung. Hal ini karena siswi nonmuslim yang bersekolah di SMA Negeri jumlahnya sangat sedikit. Mereka terpaksa menggunakan jilbab karena merasa ada beban psikologis jika tidak menggunakannya, dan akan mudah diidentifikasi sebagai kelompok yang berbeda di tengah mayoritas muslim.<sup>25</sup> Hal yang sama, dalam kasus yang berbeda pula, menimpa siswa minoritas muslim di Kota Denpasar.<sup>26</sup>

Di Denpasar dan Tomohon situasi seperti dominasi mayoritas atas minoritas juga terjadi. Di sekolah di Kota Denpasar misalnya, OSIS bidang kerohanian bertugas membuat jadwal ibadah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan bagi para siswa seraya memfasilitasinya. Seperti menyiapkan sesajen di Padmasana, Pelinggih, dan Patung Ganesha untuk ritual harian, serta Peringatan Hari Saraswati dan Silawatri untuk hari besar.

Pada peringatan hari besar keagamaan, ada kalanya siswa memakai pakaian adat Bali ke sekolah. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri, bahkan sempat menjadi isu nasional, ketika salah seorang siswi muslim di sebuah SMA Negeri di daerah Dauh Puri Klod mengenakan kerudung ke sekolah, dan menceritakan pengalamannya yang banyak ditanya dan dipandang beda oleh teman dan gurunya di media sosial. Sebenarnya hal serupa bukan hanya menimpa siswi tersebut, tapi juga teman-temannya. Bahkan fenomena ini sudah menahun. Namun siswi yang lain lebih

---

25 Ringkasan Eksekutif Penelitian, *Policy Development for Improving Student Council (OSIS) at High School Level*. MAARIF Institute, 2017.

26 Laporan Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" Kota Denpasar.

memilih diam karena sebagai minoritas tidak mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Sementara siswa Hindu bisa mengenakan pakaian adat, yang erat kaitannya dengan ritual keagamaan, ke sekolah. Padahal salah satu kebijakan yang tertuang dalam aturan sekolah menyebutkan bahwa siswa tidak boleh mengenakan atribut keagamaan apapun ke sekolah.

Selain melalui bidang kerohanian, ritual keagamaan juga tercermin melalui bidang seni. Karena seni Bali mempunyai dua macam fungsi, yakni seni sebagai kreasi dan seni sebagai ritual ibadah. Seni dan ibadah yang memiliki keterkaitan erat ini, sempat menjadi isu di Denpasar. Gempuran Ajeg Bali, salah satunya, mengakibatkan pelarangan tari Bali "syariah" kepada salah satu madrasah di Denpasar, karena siswa dari madrasah tersebut menampilkan tari Bali dengan mengenakan pakaian menutup aurat (baju dan celana panjang serta kerudung).

Di Tomohon, meskipun tidak ada perda bernuansa keagamaan yang dikeluarkan, namun penerjemahan kebijakan sangat kental dengan nuansa Kristennya. Bahkan di SMA yang lokasinya sangat dekat dengan Kampung Jawa, kelurahan yang dihuni oleh masyarakat muslim Tomohon dan terdapat belasan siswa muslim di sekolah tersebut, penerjemahan kebijakan didominasi oleh warna ajaran agama Kristen tanpa memberi ruang yang lebih untuk siswa muslim.

## **V. KERENTANAN DAN LEMAHNYA DAYA TAHAN**

Kurangnya pemahaman dan kesadaran sekolah tentang peta gerakan radikalisme melemahkan mekanisme ketahanan warga sekolah dalam menghadapinya. Selama ini tidak ada kebijakan khusus yang dibuat oleh internal sekolah untuk memproteksi warga sekolah dari penetrasi paham dan gerakan radikal. Meski demikian, sekolah sudah mulai mengarah ke arah resiliensi sosial dalam menginisiasi beberapa program anti radikalisme, serta membatasi dan menyeleksi pihak luar yang akan masuk ke dalam kegiatan kesiswaan.

Di semua sekolah yang diteliti tidak ditemukan adanya kebijakan khusus untuk menangkal radikalisme di satu sisi, dan mengokohkan kebinekaan di sisi lain. Namun upaya ke arah sana mulai terlihat di beberapa sekolah. Sistem filter dan kontrol narasumber dari luar sekolah diberlakukan

oleh beberapa sekolah di Surakarta dan Kab. Cirebon. Bahkan di SMAN di daerah Plumbon Kab. Cirebon, meskipun bukan resmi inisiatif sekolah, seorang Guru PAI sedang mengarah kepada pembuatan sistem deteksi dini. Hal yang sama juga terjadi di Surakarta, yakni SMAN 6,<sup>27</sup> MAN 1 dan MAN 2 Surakarta.<sup>28</sup>

Sebaliknya, kerentanan terhadap pandangan radikal dan praktik intoleransi begitu nyata terjadi di sekolah. Seperti disinggung sebelumnya siswa-siswa yang minoritas oleh pihak sekolah, melalui guru, maupun alumni bahkan negara diharuskan mengikuti kegiatan dan aturan-aturan yang bersifat keagamaan bagi siswa-siswa yang berbeda agama. Aturan larangan berjilbab bagi siswi-siswi muslim seperti terjadi di Denpasar dan Tomohon adalah contoh yang nyata. Sementara di Padang, semua siswi sekolah diwajibkan mengenakan jilbab sekalipun bukan muslim di sekolah.

Hal yang sama juga terjadi di Denpasar, setiap siswa harus melakukan upacara puja bakti di pagi, siang dan sore hari sebagai bagian dari ritual keagamaan yang lazim dalam tradisi Hinduisme. Siswa-siswa tampak tidak menolak secara tegas, tetapi sejatinya terdapat penolakan hanya saja tidak berani disampaikan secara tegas kepada pihak sekolah karena takut mendapatkan hukuman dari sekolah. Perhatikan kutipan di bawah ini yang kiranya dapat menggambarkan perasaan dan pikiran siswa atas kebijakan sekolah untuk mereka tidak memakai jilbab bagi yang muslim sekalipun ada keinginan memakainya karena merupakan salah satu ajaran Islam yang dipahaminya:

“Sebagai siswi muslimah, sebenarnya saya ingin memakai jilbab karena itu kan kewajiban seorang muslimah yang telah mengetahuinya sebagai ajaran. Saya ingin sekali memakai jilbab, tetapi karena sekolah dan guru melarang akhirnya kami tidak memakainya. Jika kami memakai jilbab dikatakan kurang menghargai yang mayoritas beragama non Islam. Kami supaya memilih tetap sekolah disini atau keluar dari sekolah ini. Kami akhirnya tidak memakai jilbab ke sekolah sekalipun kalau di luar sekolah kami memakai jilbab”<sup>29</sup>

---

27 Wawancara dengan Agung Wijayanto, Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta, 20 Oktober 2017.

28 Wawancara dengan Slamet Budiyono, Kepala Sekolah MAN 2 yang juga merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah MAN 1 Surakarta, 12 Oktober 2017.

29 Disampaikan ketika FGD dengan penulis di Denpasar, 19 November, 2017

Sementara bagi siswa muslim di Kota Denpasar juga kesulitan untuk menjalankan ibadah sholat sebagai ibadah wajib setiap hari, khususnya shalat dzuhur dan sholat Jum'at bila tiba saatnya waktu shalat. Di sekolah yang mayoritas beragama Hindu, tidak ada fasilitas ruang untuk menjalankan sholat wajib dzuhur. Sementara jika hari Ju'mat para siswa menjalankan Jum'atan jauh dari sekolah harus mencari masjid yang jaraknya mencapai 1.5 km dari sekolahnya.

Sementara itu aktivitas sosial yang dikerjakan di sekolah melakukan kerja bakti ke masyarakat dengan membantu mereka yang kurang mampu. Memberikan bantuan sembako sebagaimana dilakukan oleh SMA Harapan di Tomohon, misalnya. Kegiatan seperti ini tentu saja cukup menarik untuk para siswa “keluar dari kebiasaan” aktivitas rutin di sekolah yang sehari-hari mengalami kepenatan mempelajari materi pelajaran yang wajib di sekolah. “Keluar sekolah” untuk kerja sosial merupakan salah satu modal yang baik agar siswa mengenal dunia nyata di masyarakat.

Aktivitas sosial yang sama juga dilakukan di SMA Cirebon untuk mendatangi warga masyarakat yang miskin. Mereka dilatih untuk melihat kenyataan di masyarakat sebagai sesama warga negara yang nasibnya kurang beruntung. Para siswa secara bersama-sama mengunjungi masyarakat miskin untuk disantuni. Metode ini memberikan kesan yang mendalam pada para siswa untuk memahami masyarakatnya di luar aktivitas sekolah secara rutin.

Apa yang dilakukan sekolah (OSIS) seperti di atas merupakan aktivitas yang memberikan kesan positif pada para siswa. Namun kesan positif semacam itu akan berubah seketika ketika yang dibawa adalah agenda untuk mendorong adanya intoleransi di kalangan siswa sekolah. Dalam kegiatan sosial yang dikerjakan, jika hanya diarahkan pada satu komunitas tertentu yang homogen, satu agama dan etnis, maka akan mendorong adanya pikiran serta sikap yang eksklusif bukan lagi inklusif. Inilah yang kita dapat katakan sebagai penanaman bibit intoleransi di kalangan kaum muda usia sekolah menengah atas.

## VI. PRAKTIK TERBAIK PENGUATAN KEHIDUPAN KEBINEKAAN DI SEKOLAH

Pandangan mengenai OSIS sebagai katalisator sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler mengakibatkan pembina mendominasi usulan program.<sup>30</sup> Dominasi tersebut tidak lantas mematikan kreativitas OSIS. Namun sayangnya, transmisi dan penerjemahan nilai kebinekaan seringkali dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme atas nama keagamaan, dan hal ini didukung oleh pihak sekolah. Padahal jika diberi kesempatan, OSIS dapat menginisiasi program yang memuat nilai kebinekaan.

*Liyan* atau orang lain yang berbeda agama maupun paham tak luput dari pandangan OSIS. Pandangan terhadap *liyan* ini, dalam praktiknya, seringkali membuat OSIS hanya mengakomodir pengurus dari agama, golongan, kelompok, hingga jenis kelamin tertentu. Dan di beberapa sekolah, seperti di Kota Surakarta dan Denpasar, hal itu turut didukung oleh Pembina OSIS.<sup>31</sup>

Hal yang cukup melegakan hasil dari kreativitas dan negosiasi OSIS, salah satunya, pelibatan siswa nonmuslim sebagai pengisi acara peringatan hari besar Islam di sebuah SMA Negeri yang berada di Cikembar Kab. Sukabumi. Suara yang merdu menjadi alasan siswa nonmuslim tersebut didapuk untuk menyanyikan lagu religi yang aslinya dibawakan oleh Band Gigi.

Dalam konteks Kota Denpasar, di dua SMAN yang terletak di daerah Sumerta Kaja dan Tegal Harum, OSIS didominasi oleh siswa yang beragama Hindu. Meskipun sebelumnya di SMAN yang terletak di daerah Sumerta Kaja pernah ada Ketua OSIS beragama Islam, namun dinilai kesulitan serta tidak bisa bekerja secara optimal karena tugas OSIS secara umum adalah untuk membantu program sekolah. Utamanya, seperti dibahas dalam pejelasan sebelumnya, terkait dengan kegiatan keagamaan.

Meskipun mendominasi, pembina nyatanya juga memberi keleluasaan dalam kepengurusan OSIS. Di Kab. Cirebon, siswa nonmuslim mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus.<sup>32</sup> Dominasi tersebut juga tidak lantas mematikan kreativitas OSIS. Karena jika diberi kesempatan,

---

30 Misalnya potret OSIS di SMAN 6 Surakarta. Laporan Penelitian Kota Surakarta.

31 Laporan Penelitian Kota Denpasar.

32 Ringkasan Eksekutif Penelitian, *Policy Development for Improving Student Council (OSIS) at High School Level*. Jakarta: MAARIF Institute, 2018.

OSIS dapat menginisiasi program yang memuat nilai kebinekaan, seperti Karnaval Kebangsaan.<sup>33</sup>

Bahkan di SMAN yang daerahnya sarat dengan radikalisme di sekolah, pernah ada siswa nonmuslim yang menjadi pengurus OSIS. Begitu juga yang terjadi di satu SMAN lainnya di daerah Plumbon. Praktik yang sama juga ditemukan di Kota Denpasar. OSIS di SMAN yang berada di Dauh Puri Klod dan Peguyangan Kaja cenderung inklusif karena mengakomodir siswa non-Hindu meskipun hanya sebagai anggota. Bahkan di SMAN yang terletak di Peguyangan Kaja, Ketua MPK merupakan seorang perempuan yang beragama Islam.

Hal yang luput dari dominasi Pembina OSIS adalah absennya mereka dalam mendorong kelompok yang berbeda untuk melakukan kegiatan bersama. Selama ini, sekolah-sekolah di Surakarta, Denpasar, dan Tomohon yang memiliki kerohanian tiga agama berbeda (Islam, Kristen, dan Katolik), cenderung disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Padahal kerjasama antar komunitas agama dapat menjadi kekuatan dan inti dalam proses kebangsaan dan pencegahan radikalisme.<sup>34</sup> Kalaupun hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler, setidaknya waktu luang yang ada dapat dimanfaatkan ke arah sana.

Meskipun berbeda dalam urusan mengakomodasi pengurus OSIS, nyatanya di Kota Denpasar terdapat 2 SMAN, terletak di daerah Dauh Puri Klod dan Tegal Harum, yang memiliki Rohis meskipun bersifat informal, bukan bidang kerohanian dari OSIS. Remaja Islam (Rismanda) dan Kelompok Remaja Islam (Krisma) kerap melakukan kegiatan pada Idul Adha dan bulan Ramadhan, serta pengajian rutin bulanan. Aktivitas yang dilakukan misalnya, berkorban ketika Idul Adha dengan memotong kambing dan membagikannya kepada warga sekolah. Kambing dipilih sebagai hewan yang dikurbankan karena dalam tradisi agama Hindu, sapi merupakan hewan yang disucikan. Pada 2017, atas inisiatif dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI), dibentuk perkumpulan rohis se-Kota Denpasar.

Jika di Denpasar Rohis merupakan organisasi informal, maka di sebuah SMA Negeri Tomohon Rohis merupakan bagian dari bidang kerohanian

33 Ihwal Karnaval Kebinekaan, dijabarkan dalam uraian sub-tema "Mencari Model Ketahanan di Sekolah" di halaman selanjutnya.

34 Misalnya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rohis, Rokot, dan Rokris di Surakarta. Laporan Penelitian Kota Surakarta.

OSIS. Ini berdasarkan kebijakan afirmatif sekolah terhadap kebutuhan siswa muslim. Rohis di sekolah ini saling mengetahui dan berbagi informasi dengan Kerohanian Kristen (Rokris) dan Kerohanian Katolik (Rokat). Namun hal yang sama tidak berlaku di dua SMA lainnya, sekolah yang terletak di Kakaskasen dan Tumatangtang Satu, meskipun ada beberapa siswa muslim disana. Namun kedua sekolah tersebut tetap memberikan kesempatan kepada siswa nonnasrani untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di SMA Negeri yang ada Rohis tadi, siswi muslim pun mendapat kebebasan untuk mengenakan jilbab.

Sementara dari sisi gender, sebuah MAN yang berada di Jalan Gajah Mada Padang dan sebuah MA di Ubung Denpasar, memberlakukan kebijakan bahwa perempuan tidak bisa menempati posisi ketua OSIS/OSIM (Organisasi Siswa Intra Madrasah—OSIS nya madrasah di Kota Padang). Jika terjadi pemilihan (*voting*) terbuka atau pemilihan langsung dengan suara terbanyak untuk calon perempuan, maka pihak sekolah mencoba mengkompromikan agar siswa laki-laki yang menjadi ketua.

Perempuan tidak bisa menjadi ketua OSIS/OSIM merupakan hal yang kasuistik semata, karena di sekolah lain bisa dijabat oleh seorang perempuan. Seperti yang terlihat di sebuah SMAN di daerah Rimbo Kaluaang Padang dan Tomohon. Bahkan di sebuah MAN di Kuranji Padang dan sebuah SMAN di Plumbon Cirebon, perempuan menjadi ketua OSIS/OSIM nampak telah menjadi tradisi di sekolah.

Fenomena yang cukup mencengangkan terjadi di Surakarta. Terdapat aktivis OSIS yang menganggap orang atau kelompok yang berbeda dengan dirinya dengan sebutan “kafir” atau sesat.<sup>35</sup> Kebanyakan pengurus Rohis di Surakarta juga enggan untuk berhubungan dengan teman sebaya yang berbeda agama. Dalih yang dikemukakan bahwa iman mereka kurang kuat, sehingga dikhawatirkan akan terbawa arus agama lain.

Faktor lain yang memengaruhi adalah perasaan canggung satu sama lain. Sikap canggung ini tidak hanya dalam hal pelaksanaan ibadah, tetapi juga dalam hubungan sosial yang lebih praktis. Penanda keagamaan seperti penggunaan atribut jilbab dan salib seakan menghalangi mereka untuk berteman. Namun di sisi lain mereka menyatakan bahwa dalam

---

35 Lihat kembali sikap anti-kafir yang didefinisikan Furqon, 16 tahun, Ketua Rohis MAN 1 Surakarta, sebagai sikap menjaga jarak dari orang-orang nonmuslim. Lihat dalam <https://conveyindonesia.com/berita-actual/2017/11/17/upaya-mengikis-intoleransi-mempertebal-semangat-keberagaman/>. Diakses pada 29 Januari 2018.

konteks hubungan sosial, kerjasama antara muslim dan nonmuslim tidak masalah. Meskipun di lapangan ditemukan fenomena bahwa siswa muslim enggan membeli makanan yang dijual siswa nonmuslim yang berhimpun dalam Rokris dan Roket, padahal keuntungan dari hasil jualan itu untuk kegiatan OSIS bidang kerohanian. Dalam ranah ini, pembina yang sering mendominasi pun tak bisa berbuat banyak. Malah terdapat beberapa orang guru non-Pembina OSIS atau Rohis, yang memberikan persetujuan, bahkan ada yang memprovokasi siswanya. Praktik semacam ini tentunya bertentangan dengan tujuan dibentuknya OSIS sebagai wadah kegiatan bersama para siswa di sekolah dan luar sekolah, apapun agamanya.

Meskipun demikian, praktik gotong royong yang bermakna meringankan beban orang lain, dapat dijumpai di sebuah SMAN di Nusukan-Banjarsari Surakarta. Hal ini terlihat dari beberapa siswa muslim yang tergabung dalam Rohis, bersedia dengan sukarela membantu mengumpulkan botol bekas untuk disumbangkan kepada Roket dalam rangka pengumpulan dana. Di sekolah ini, Roket memang seringkali melakukan kegiatan pengumpulan dana melalui usaha.<sup>36</sup>

Di sisi lain, siswa beragama Kristen dan Katolik di Surakarta menikmati proses belajar tanpa merasa terdiskriminasi. Karena mereka difasilitasi serta diberi ruang keagamaan dan pendanaan untuk menjalankan program Rokris dan Roket. Dalam proses penilaian pun, tidak ada perbedaan antara siswa nasrani dan nonnasrani. Bahkan di salah satu kelas di sebuah SMA Negeri, yang menjadi ketua dan wakil ketua kelas adalah siswa beragama Kristen, yang notebene menjadi minoritas secara agama di kelas tersebut. Siswa muslim tak mempermasalahkan hal tersebut karena bagi mereka yang penting adalah tanggungjawab. Kendati demikian, ada satu hal yang menjadi catatan siswa nonmuslim, yakni terkait dengan syarat tidak tertulis bahwa yang menjadi ketua OSIS adalah orang yang harus bisa membaca al-Qur'an.

Masalah lain yang OSIS tidak mampu mewarnainya adalah waktu pelaksanaan shalat bagi siswa muslim di Denpasar. Siswa di SMA Negeri yang berlokasi di Sumerta Kaja, Denpasar Timur, memilih melaksanakan shalat dzuhur di rumah karena tidak ada kesempatan melakukannya di sekolah. Kondisi tersebut berbeda dengan siswa di SMA Negeri yang terletak di

---

36 Wawancara dengan Anya, Anggota Roket dan Hanifa, Anggota Rohis SMAN 6 Surakarta.

daerah Tegal Harum, yang melakukan shalat dzuhur di masjid dekat sekolah karena mereka memiliki waktu istirahat siang. Hal tersebut juga dilakukan oleh siswa di SMA Negeri di daerah Peguyangan Kaja. Bahkan kepala sekolah memberi kebijakan lisan bahwa semua tempat di SMAN tersebut bisa dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau pun ada siswa yang merasa canggung, ia bisa melaksanakan shalat dzuhur di ruangnya.<sup>37</sup>

Terkait dengan shalat ini, SMA Negeri di daerah Dauh Puri Klod menyediakan mushola yang terletak di belakang ruang guru dengan ukuran sekitar 3x3 meter. Di dalamnya tersedia lengkap peralatan untuk shalat. Sekolah lain yang menyediakan tempat untuk shalat adalah SMAN yang terletak di Jalan Kamboja, Daging Puri Kangin, Denpasar Utara. Bukan hanya perkara shalat dzuhur, bahkan di SMAN ini disediakan ruangan untuk shalat Jum'at.

Secara khusus terkait dengan shalat Jum'at, sekolah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Beberapa sekolah, selain madrasah aliyah tentunya, memberikan dispensasi khusus bagi siswa muslim untuk shalat Jum'at. Bahkan di SMAN di daerah Dauh Puri Klod dan Tegal Harum, jam pelajaran pada hari Jum'at berakhir pada jam 12.30 WITA. Sehingga siswa muslim bisa langsung shalat Jum'at di masjid terdekat karena waktu shalat Jum'at sekitar jam 12.30 WITA. Akan tetapi di SMAN di daerah Tegal Harum tersebut, siswa harus izin terlebih dahulu karena ada pengayaan dan pembinaan dari wali kelas. Izin serupa juga dilakukan oleh siswa SMAN yang terletak di Sumerta Kaja. Sementara siswa di SMAN yang berlokasi di Peguyangan Kaja tidak bisa melaksanakan shalat Jum'at karena jam belajar pada hari Jum'at berakhir jam 12.30 WITA.

## **VII. MENCARI MODEL KETAHANAN DARI KASUS-KASUS DI SEKOLAH**

Model ketahanan ini sifatnya kasuistik. Efektif di satu sekolah atau daerah, belum tentu efektif di sekolah atau daerah lain. Namun indikasi penerapan model tetap merujuk pada upaya meminimalkan praktik segregasi sosial berdasarkan primordialisme keagamaan. Integrasi sosial di antara siswa berbeda agama dan suku dapat mewujudkan dalam praktik

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ida Bagus Ngurah, Kepala Sekolah SMAN 8 Denpasar, 13 Oktober 2017.

kehidupan keseharian mereka di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

SMA Negeri di daerah Nunukan-Banjarsari, MA Negeri di daerah Kadipiro-Banjarsari, dan MA Negeri di daerah Sriwedari-Laweyan Surakarta menempuh upaya melalui **(1) screening terhadap mentor**. Melacak riwayat hidup dan kapasitas keilmuan dilakukan demi memastikan OSIS agar mendapatkan mentor yang tepat. **(2)** Upaya lain yang juga ditempuh oleh SMA Negeri di daerah Nunukan-Banjarsari Surakarta dengan **mendorong siswa untuk belajar dari guru**. “Belajar tanpa guru dan atau belajar dari internet, berarti belajar dengan setan”, ungkap seorang Guru PAI di sekolah tersebut.<sup>38</sup>

SMA Negeri yang terletak di daerah Purwodiningratan-Jebres Surakarta menempuh upaya dengan cara **(3) mewajibkan siswa Kelas X** untuk berangkat ke sekolah diantar orang tuanya dalam waktu setahun. Hal ini dilakukan supaya ada keterhubungan antara guru, orang tua, dan siswa.<sup>39</sup> Sekolah ini juga mewajibkan hafalan nilai-nilai utama pendidikan karakter. Menghafal walaupun bernilai kognitif, namun jika dipraktikkan dengan cara yang baik akan menguatkan keindonesiaan dalam diri siswa.

Cara lain ditempuh MA Negeri di daerah Selatan Sukabumi melalui **(4) Pesantren Sekolah**.<sup>40</sup> Salah satu tujuan pesantren ini adalah memberikan sumber pengetahuan keagamaan yang lebih otoritatif dan memutus ketergantungan siswa dalam mencari informasi keagamaan ke pihak luar. Sejauh ini keberadaan pesantren dapat dikatakan berhasil karena siswa banyak mencari referensi keagamaan ke pesantren sekolah. Sehingga hubungan dengan organisasi dari luar bisa diminimalisir.<sup>41</sup>

Menyadari betapa rawannya siswa dari pengaruh radikalisme, seorang Guru Pendidikan Agama Islam sekaligus Pembina Rohis berinisiatif untuk menghadirkan organisasi pelajar di SMA Negeri di daerah Plumbon. **(5) Kerjasama dengan ormas Islam dan lembaga-lembaga keislaman yang moderat yang** sudah jamak-*mainstream*. Pengalamannya dalam berhadapan dengan kelompok Islam radikal yang hendak menawarkan

38 Wawancara dengan Afifah, Guru PAI SMAN 6 Surakarta, 13 Oktober 2017.

39 Wawancara dengan Sri Widodo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 3 Surakarta, 17 Oktober 2017.

40 Yudistira, Hadiansyah, “Menuju Pesantren Inklusif: Potret Pengelolaan Pesantren Sekolah dalam Rangka Menangkal Radikalisme” dalam *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon*. Jakarta: MAARIF Institute, 2018, h. 329-335.

41 Laporan Penelitian Kabupaten Sukabumi

penguatan materi keislaman, membuatnya mendeklarasikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di SMAN tersebut. Pilihan terhadap IPNU dan IPPNU karena hanya organisasi itulah yang diketahui, dan di saat yang sama di organisasi ini pula dia memiliki jaringan dan perkawanan dengan tokoh-tokoh moderat di Cirebon.<sup>42</sup>

Usahnya ini cukup efektif dalam menghalau gerakan islam radikal masuk ke sekolah. Sejak deklarasi IPNU dan IPPNU, upaya infiltrasi gerakan radikal sudah tidak ada. Hingga lebih jauh, pembina rohis bekerjasama dengan Fahmina Institut untuk menyalurkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan terlibat dalam berbagai upaya mempromosikan kebinekaan.

Cara lain ditempuh oleh Guru Sosiologi SMAN di daerah Jamblang dengan melakukan **(6) kunjungan atau anjongsana** ke kelompok yang berbeda. Melalui cara tersebut, ia berupaya memperkenalkan siswa tentang realitas kebinekaan secara langsung. Dalam pelajaran praktik, secara reguler dia menugaskan siswa untuk berkunjung ke tempat ibadah agama nonmuslim dan mengenal agama lain secara langsung. Menurutnya, kunjungan ke sejumlah tempat ibadah agama non-Islam merupakan satu-satunya cara yang paling realistis dalam memperkenalkan kebinekaan.<sup>43</sup>

Sementara dari siswa, **(7) karnaval kebinekaan** menjadi salah satu kreasi OSIS di sebuah SMAN Pusat Kota Kab. Cirebon dalam mendorong kebinekaan di sekolah. Karnaval ini berupa keharusan untuk menggunakan pakaian pahlawan nasional tertentu. Dengan demikian, siswa mengerti bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh satu agama dan suku tertentu, tapi oleh semua warga dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda-beda.<sup>44</sup>

Sementara itu, SMA yang terletak di Talete 2 Tomohon memiliki agenda tahunan **(8) mengunjungi lokasi bersejarah** ke Waruga dan makam pejuang muslim di Tondano. Kegiatan ini mengenalkan kearifan lokal berupa cerita sejarah etnis Minahasa dan kepercayaannya, serta menjelaskan kehadiran

---

42 Koidah, "Potret Toleransi dari Rohis, IPNU dan IPPNU" dalam *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon*. Jakarta: MAARIF Institute, 2018, h. 336-346.

43 Wawancara dengan Maulana, Guru Sosiologi dan Pembina Paskibraka SMAN 1 Jamblang Cirebon, 6 Oktober 2017.

44 Pernyataan Eki, Ketua OSIS SMAN 1 Kab. Cirebon dalam FGD Temuan Penelitian, 23 November 2017.

pejuang muslim di tanah Minahasa.<sup>45</sup>

Sementara itu, dari pihak pemerintah, **(9) partisipasi aktif Kementerian Agama** juga berperan dalam penguatan kebinekaan. Secara reguler, Kantor Kemenag Kab. Cirebon misalnya, melakukan penguatan kapasitas kepada guru-guru materi Pelajaran Agama Islam tentang wawasan islam moderat. Sedangkan dengan fokus sasaran pada murid, setiap tahun ajaran baru dan pergantian pengurus Rohis, melakukan pesantren kilat untuk penguatan kapasitas tentang wawasan kebangsaan dan kebinekaan di pesantren-pesantren di Cirebon.<sup>46</sup>

Kota Tomohon memiliki cara-cara tersendiri dalam praktiknya. **(10) Alokasi dana pendidikan** untuk kesejahteraan guru dan kepala sekolah demi memotivasi guru agar tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Tesis yang digunakan ialah ketika guru sejahtera, ia dapat berperan maksimal dalam menumbuhkan budaya toleran dan harmoni di sekolah.<sup>47</sup>

**(10) Partisipasi aktif dari negara**, dalam hal ini dinas pendidikan, melalui respon terhadap isu-isu aktual, turut menjaga harmoni di Tomohon. Dinas pendidikan kerap mengumpulkan guru dan kepala sekolah serta menggelar seminar terkait isu-isu yang hangat pada masanya. Misalnya, seminar Islamologi sebagai respon dari Aksi Bela Islam di Jakarta tahun 2016 lalu.<sup>48</sup>

Dari model ketahanan sekolah tersebut, secara garis besar ada empat model yang bisa diangkat sebagai bentuk ketahanan sekolah. *Pertama*, pengembangan model sekolah inklusif, sebagaimana yang terjadi di beberapa sekolah di Surakarta, Denpasar, dan Tomohon. Inklusifitas ini didasarkan pada tuntunan sikap keterbukaan, toleransi, harmoni dan penghargaan kepada semua siswa tanpa melihat unsur SARA.

*Kedua*, pengembangan sekolah berbasiskan pada kekuatan patron harmoni dan kebinekaan. Banyak siswa di sekolah yang menjadi sampel penelitian tidak memiliki patron atau idola yang baik soal toleransi dan nilai-nilai kebangsaan. Aspek ini bisa ditindaklanjuti dengan mengenalkan tokoh-tokoh moderat kepada siswa-siswa tersebut.

*Ketiga*, pengembangan model sekolah yang menjunjung tinggi kebangsaan dan nasionalisme. Praktik-praktik sederhana kehidupan para

45 Wawancara dengan Ketua OSIS SMA Kristen 1 Tomohon, 6 Oktober 2017.

46 Wawancara dengan Imron, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, 16 Oktober 2017.

47 Wawancara dengan Kepala Sekolah MA Mardhatillah Tomohon, 3 Oktober 2017.

48 Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Lentera Harapan Tomohon, 12 Oktober 2017.

siswa, dapat didorong menjadi kebijakan di level OSIS yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan nasionalisme.

*Keempat*, pengembangan model sekolah dengan menjadikan guru dan siswa menjadi benteng utama anti paham dan gerakan radikalisme. Mekanismenya seperti praktik *panopticon*, dimana guru dan siswa diberikan kesempatan untuk menyatakan kebenaran tentang informasi yang ada. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan pendekatan persuasif yang mendidik dan mencerahkan.

## VIII. PETA AKTOR PENGUATAN SIKAP INKLUSIF OSIS

### A. Peran Negara Menumbuhkan Nasionalisme

Menumbuhkan apalagi membudayakan sikap inklusif, bukan hal yang sederhana. Namun demikian upaya dapat dikerjakan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah oleh pihak negara (pemerintah) daerah maupun pemerintah pusat. Dalam konteks sekolah, (OSIS) sebagai organisasi siswa di tingkat menengah akan dapat menjadi wadah untuk membangun dan membudayakan sikap terbuka (inklusif) di kalangan para siswa jika terdapat peran yang diambil oleh pemerintah.

Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Totok dan Dony Koesoma dalam seminar sosialisasi hasil penelitian MAARIF Institute 26 Januari 2018 menyatakan sebenarnya pihak pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian untuk para dinas dan sekolah dalam mengelola OSIS diharapkan melakukan aktivitas yang mendukung semangat nasionalisme, kebersamaan dan keindonesiaan.

OSIS sebagai wahana aktivitas siswa memiliki peran strategis jika diisi dengan aktivitas yang tidak mengarah pada eksklusivisme. Namun juga akan menjadi negatif, tidak mendukung keterbukaan dan kebangsaan jika diisi dengan aktivitas yang eksklusif, primordialistik serta sektarian. Oleh sebab itu, negara sebagai salah satu pemilik otoritas, melalui kebijakan yang dikeluarkan mampu mendorong sekolah dan para siswa memiliki keterbukaan dan nasionalisme yang jelas dan kuat. Sekolah melalui OSIS melakukan aktivitas yang secara tidak langsung berhubungan dengan membangun, menumbuhkan dan membiasakan keterbukaan dan nasionalisme. Hal semacam ini menjadi perhatian para pengamat

pendidikan dan pengambil kebijakan di level negara baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

## **B. Peran ormas Islam Moderat (Muhammadiyah dan NU)**

Setelah menumbuhkan nasionalisme dilakukan oleh negara, menumbuhkan inklusivisme dan nasionalisme juga bisa dilakukan oleh ormas keagamaan. Hal ini penting oleh sebab memperhatikan situasi seperti tergambar di atas tersebut, mendorong beberapa Guru Pembina Rohis yang mengetahui adanya indikasi radikalisme di OSIS melakukan advokasi dengan menggunakan jejaring lembaga di luar sekolah demi memotong embrio intoleransi. Atas inisiatif Guru Pembina OSIS akhirnya dibentuklah Pengurus Komisariat IPNU dan IPPNU dengan tujuan memberikan intervensi kepada Rohis untuk memberikan nilai-nilai keterbukaan agar lebih inklusif. IPNU dan IPPNU dipilih karena Pembina Rohis tersebut merasa memiliki kesamaan visi dan misi dalam upaya menekan intoleransi dan radikalisme di sekolah. Selain itu, bentuk struktural dan kaderisasi yang dilakukan pun jelas, karena aktivis Rohis nantinya bisa melanjutkan ke tingkat cabang.

Pendirian Pengurus Komisariat IPNU dan IPPNU ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan sempat ada guru yang tidak mendukung, karena berbeda visi dengan Pembina OSIS, hingga akhirnya kepala sekolah mengadakan rapat dan mengambil kebijakan untuk mendukung Pembina Rohis tersebut. Efeknya, Pembina Rohis tersebut dilabeli sebagai guru sekuler karena dianggap mengembangkan nilai-nilai sekularisme terhadap anak-anak Rohis. Namun pada akhirnya, OSIS tidak terinfiltrasi gagasan radikal dari aktivitas yang dilakukan siswanya karena intervensi sekolah menemukan momentumnya yang tepat. Kegiatan semacam ini diharapkan terus berlangsung di sekolah.

NU, melalui IPNU dan IPPNU merupakan organisasi yang dapat menjadi penyambung gagasan Islam moderat di Indonesia. Organisasi ini memiliki ikatan dengan PBNU yang memiliki organ-organ di level kecamatan dan perdesaan. Oleh sebab itu sangatlah strategis sebagai agen Islam moderat. Peran IPNU dan IPPNU dengan demikian akan turut membentengi para siswa dari pemikiran dan gerakan Islam *non-mainstream* yang intoleran.

Sementara itu, di bagian lain, sebenarnya harapan itu juga ditumpahkan pada Muhammadiyah untuk memberikan peran pada

sekolah untuk membendung radikalisme seperti dikemukakan oleh peserta seminar hasil penelitian "*Policy Development for Improving Student Council (OSIS) at High School Level*" pada 26 Januari 2018. Sebagai organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah telah dengan tegas menyatakan Islam Moderat sebagai jalan yang dipilih. Oleh sebab itu, Muhammadiyah tidak akan berusaha mendorong perkembangan Islam yang tidak memiliki watak moderat, inklusif, dan toleran. Muhammadiyah hendak mengembangkan watak Islam yang rahmatan lil alamin, yakni Islam yang mampu mengayomi seluruh warga negara dari pelbagai bentuk kejahatan politik, ekonomi maupun keagamaan.

Hal itu sejalan dengan watak radikal (keras) yang cenderung ekstrem bukanlah watak Muhammadiyah. Oleh sebab itu jika dalam tubuh umat Islam, khususnya Muhammadiyah hendak diseret-seret ke arah gerakan radikal apalagi teroris jelaslah bukan terinspirasi dari gerakan Muhammadiyah yang dikehendaki KH. Ahmad Dahlan. KH. Ahmad Dahlan telah memberikan teladan yang sangat baik dan mendalam ketika mengajak para pendeta, pastor dan dokter-dokter Kristen untuk berkarya di balai pengobatan milik Muhammadiyah. KH. Ahmad Dahlan telah berdialog, berkunjung dan bekerjasama dengan semua umat beragama sejak mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Oleh sebab itu, suatu pengingkaran sejarah Muhammadiyah jika saat ini Muhammadiyah hendak diseret-seret ke arah pengembangan Islam yang kurang ramah, intoleran serta eksklusif dengan umat beragama lain.

Posisi penting Muhammadiyah dalam mengembangkan moderasi Islam tidak bisa dianggap ringan sebab fakta lapangan sekarang berhadapan-hadapan dengan hadirnya kelompok-kelompok baru dalam Islam yang tampak cenderung membawa pada eksklusivisme keislaman dalam ranah pergaulan sosial. Hadirnya radikalisme di kalangan kaum muda dan profesional seperti dilaporkan *Navara Foundation* November 2017 bahwa anak-anak muda setingkat sekolah menengah atas dan mahasiswa sebanyak 23,4% mendukung gerakan radikal. Demikian pula dengan pegawai swasta mendukung gerakan radikal mencapai 85%.

Fakta tersebut jelas menjadi tantangan serius dari Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang telah tua dan berusaha terus memperkembangkan visi Islam moderat. Hal ini disebabkan seringkali Muhammadiyah oleh kelompok-kelompok baru dalam Islam dituduh

sebagai ormas Islam yang kurang bergairah dalam membela umat Islam karena tidak didorong untuk melakukan demonstrasi pengerahan massa. Muhammadiyah bahkan baru-baru ini pernah dituduh tidak membela umat Islam ketika tidak mendukung pembubaran salah satu ormas Islam di Indonesia pada tahun 2017 ini.

Jika dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU mampu memberikan warna yang maksimal, maka kita masih dapat berharap Islam di Indonesia, termasuk di sekolah-sekolah akan berada pada kultur Islam Moderat sebagai bentuk asli Islam Indonesia, yang menghargai kultur nusantara. Bukan Islam yang bercorak Arabisme.

### **C. Pengurus OSIS dan Hegemoni Alumni**

Seperti ditemukan dalam kajian, pengurus OSIS dan para alumni dapat menjadi agen yang strategis untuk menyebarkan praktik-praktik inklusivisme, toleransi dan meneguhkan kebangsaan. Kita dapat perhatikan beragamnya para pengurus OSIS dari segi agama (multi agama), demikian pula dari segi etnis. Hal seperti ini merupakan kekuatan OSIS untuk mendukung inklusivisme, toleransi dan nasionalisme. Berbeda dengan pengurus OSIS yang hanya satu agama maupun satu etnis. Untuk mendukung keterbukaan, toleransi dan nasionalisme sedikit terhambat karena minimnya pergaulan yang bervariasi dan heterogen.

Oleh sebab itu, perlu adanya dorongan agar kepengurusan OSIS itu mempertimbangkan keragaman etnis dan agama sehingga dapat saling belajar. Masalahnya seringkali di sebuah sekolah yang didominasi agama dan etnis tertentu maka etnis yang minoritas juga agama minoritas ketika terdapat rekrutmen kepengurusan OSIS tidak turut pula untuk bersedia aktif di sana. Dampaknya OSIS hanya diisi oleh satu etnis dan agama saja.

Selain dari kepengurusan OSIS yang beragam untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan inklusivisme, toleransi dan nasionalisme adalah para alumni. Seperti terjadi di SMA N Cirebon disana dari alumni yang aktif di organisasi seperti IPNU dan IPPNU dapat terlibat dalam aktivitas di OSIS. Sebenarnya bukan hanya dari NU, dari Muhammadiyah seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) juga strategis dalam membantu menumbuhkan inklusivisme, toleransi dan nasionalisme.

Sementara dari sisi gender, sebuah MAN yang berada di Jalan Gajah Mada Padang dan sebuah MA di Ubung Denpasar, memberlakukan kebijakan bahwa perempuan tidak bisa menempati posisi ketua OSIS/OSIM (Organisasi Siswa Intra Madrasah—OSISnya madrasah di Kota Padang). Jika terjadi pemilihan (*voting*) terbuka atau pemilihan langsung dengan suara terbanyak untuk calon perempuan, maka pihak sekolah mencoba mengkompromikan agar siswa laki-laki yang menjadi ketua.

Perempuan tidak bisa menjadi ketua OSIS/OSIM merupakan hal yang kasuistik semata, karena di sekolah lain bisa dijabat oleh seorang perempuan. Seperti yang terlihat di sebuah SMAN di daerah Rimbo Kaluaang Padang dan Tomohon. Bahkan di sebuah MAN di Kuranji Padang dan sebuah SMAN di Plumbon Cirebon, perempuan menjadi ketua OSIS/OSIM nampak telah menjadi tradisi di sekolah.

Peran alumni yang memiliki wawasan keterbukaan, toleran dalam keagamaan merupakan kelompok yang dapat berpengaruh pada para siswa di sekolah melalui kegiatan OSIS. Para alumni yang berwawasan terbuka dan toleran dalam beragama dapat menjadi agen penyebaran keterbukaan dan toleransi ke sekolah karena sering tidak dicurigai oleh siswa dan sekolah. Hal seperti itu dialami oleh siswa-siswa di Surakarta, Cirebon, Padang maupun Denpasar.

Jaringan alumni dengan demikian tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan pembentukan karakter siswa melalui OSIS. Jika mereka para alumni bermental terbuka maka akan membentuk pengurus OSIS menjadi terbuka. Tetapi jika alumninya tertutup maka mereka juga tertutup, bahkan intoleran. Oleh sebab itu tergantung karakteristik alumninya apakah terbuka ataukah intoleran dalam beragama dan bernegara.

Di semua sekolah yang diteliti tidak ditemukan adanya kebijakan khusus untuk menangkal radikalisme di satu sisi, dan mengokohkan kebinekaan di sisi lain. Namun upaya ke arah sana mulai terlihat di beberapa sekolah. Sistem filter dan kontrol narasumber dari luar sekolah diberlakukan oleh beberapa sekolah di Surakarta dan Kab. Cirebon. Bahkan di SMAN di daerah Plumbon Kab. Cirebon, meskipun bukan resmi inisiatif sekolah, seorang Guru PAI sedang mengarah kepada pembuatan sistem deteksi dini. Hal yang sama juga terjadi di SMA N yang berlokasi di Nusukan-Banjarsari Surakarta.

## IX. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap berbagai temuan penelitian yang dilakukan oleh MAARIF Institute, keberadaan OSIS sebagai organisasi siswa di sekolah sangatlah terbuka terhadap penetrasi dan pengaruh dari berbagai ideologi dan pemikirsn yang ada. Jika yang datang ke OSIS adalah kelompok yang memiliki paham intoleran dan radikal dalam hal keagamaan, maka mereka dapat menjadi intoleran bahkan radikal. Namun jika yang datang kepada OSIS adalah kelompok moderat yang terbuka, toleran dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, maka OSIS pun akan menjadi terbuka, toleran dan berjiwa nasionalisme yang kuat. Inilah dilema dari OSIS dimana para pengurusnya adalah kaum muda, yang sangat terbuka terhadap banyak hal.

Sementara itu, peran ormas juga sangat penting dalam memengaruhi sekolah-OSIS khususnya. Jika ormas yang menjadi mitra sekolah dan OSIS adalah ormas yang cenderung intoleran dan radikal mereka pun akan seperti ormas yang menjadi mitra tersebut. Tidak bisa dielakkan karena banyak sekolah, terutama sekolah negeri saat ini membutuhkan “pendampingan keagamaan”, maka pelibatan ormas keagamaan untuk menjadi pembinanya adalah salah satu keniscayaan, di tengah keterbatasan waktu dan jumlah sumber daya manusia di sekolah. Sayangnya seringkali pihak sekolah tidak memahami dengan baik siapa sebenarnya pengurus dan kegiatan ormas tersebut. Hanya karena kedekatan dan hubungan personal yang sangat subjektif, maka siapapun, tanpa kriteria yang jelas, diperbolehkan menjadi Pembina OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Jaringan alumni merupakan kelompok yang sangat penting dalam kaitan dengan kegiatan OSIS. Banyak alumni yang mampu memanfaatkan kelebihan dan kekurangan para siswa dan pengurus OSIS sehingga seringkali para alumni ini datang ke sekolah dengan membawa misi tertentu dari kelompok yang menjadi afliasinya. Siswa dan pengurus pun seringkali tidak menyadari terhadap berbagai agenda jaringan alumni. Dalam hal ini paham-paham keagamaan yang intoleran dan radikal dapat dengan mudah masuk ke sekolah melalui jaringan alumni yang menjadi mentor di sekolah dan OSIS dalam aktivitas keagamaan.

Kebijakan pemerintah pusat (melalui beberapa Peraturan Menteri) menjadi sangat perlu diperhatikan sebab seringkali kebijakan yang

sudah terbuka, toleran dan membangun nasionalisme namun atas nama otonomi daerah dan kebijakan lokalitas maka kebijakan pemerintah pusat mengalami distorsi. Kebijakan tersebut seringkali dibajak di tingkat lokal karena kehendak pemerintah daerah atau pun dinas pendidikan bahkan pihak sekolah dan guru yang ada di sebuah sekolah. Inilah kesulitan pelaksanaan kebijakan yang sifatnya nasional ketika akan diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia dengan karakteristik daerah yang sangat beragam.

Namun terlepas dari semua yang bersifat negatif, OSIS dan sekolah dapat menjadi benteng pertahanan membangun keagamaan yang inklusif, toleran dan tidak radikal. Dengan memberikan ruang pada ormas-ormas keagamaan yang bersifat moderat untuk turut andil ambil bagian dalam proses pendampingan kegiatan keagamaan di sekolah. Selain itu, sekolah menjadi mitra kerja yang sistematis dengan ormas keagamaan yang bersifat moderat bukan yang intoleran dan radikal karena di Indonesia disadari banyak varian ormas keagamaan yang tidak dipahami karakteristik keagamaannya oleh sekolah apalagi para siswa di OSIS. Inilah salah satu daya tahan sekolah untuk tetap tumbuh dalam iklim keragaman, keterbukaan, toleransi dan kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Bubalo, Anthony dan Greg Feally, *Joining the Caravan: The Middle East, Islamism, and Indonesia*, Australia: The Lowy Institute for International Policy, 2005, hal. viii

Ciciek, Farha, *Merawat Tradisi Moderat Kaum Muda*, makalah tidak diterbitkan, 2008.

Ciciek, Farha, *Perempuan dilarang Menjadi Pemimpin: Penyebaran Ketidakadilan Gender di Sekolah Umum: Studi di Tujuh Kota*, 2008;

Darraz, Muhd. Abdullah, "Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan", dalam *Jurnal MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8, No. 1, Juli, 2013.

El-Fadl, Khaled Abou, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2007)

Fitriyana, Pipit Aidul (ed.), *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon* (Jakarta: MAARIF Institute, 2018)

Habermas, Jurgen, *Intolerant and Discrimination* (UK: Sage Publication, 2011).

Koidah, "Potret Toleransi Rohis, IPNU dan IPPNU", dalam *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kasus Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon* (Jakarta: MAARIF Institute, 2018).

Marty, Martin F., *Fundamentalism* (UK: Oxford, 1992).

Moghaddam, Fathali, "The Staircase to Terrorisme", *American Psychologist*, Vol. 60, No. 2, February-March, 2005.

Mubarak, M. Zaki, "Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keberagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam *Jurnal MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8, No. 1, Juli, 2013.

Nashir, Haedar, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Mizan-MAARIF Institute, 2013).

Wahid, Abdurrahman (ed.), *Ilusi Negara Islam*, Jakarta: The Wahid Institute-MAARIF Institute-Gerakan Bhineka Tunggal Ika, 2008.

Woodward, Mark, dkk., "Muslim Education, Celebrating Islam and Having Fun As Counter-Radicalization Strategies in Indonesia", *Perspectives on Terrorism: A Journal of the Terrorism Research Initiative*, 4.4. (2010): 42

Yudistira, Hadiansyah, "Menuju Pesantren Inklusif: Potret Pengelolaan Pesantren Sekolah dalam Rangka Menangkal Radikalisme", dalam *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kasus Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon* (Jakarta: MAARIF Institute, 2018).

## **Penelitian**

*Executive Summary* Survei Nasional tentang Sikap Keberagamaan di Sekolah dan di Universitas di Indonesia, Api dalam Sekam: Keberagamaan Gen Z. (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2017).

Laporan Penelitian, *Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Kabupaten Cirebon* (Jakarta: MAARIF Institute, 2017).

Laporan Penelitian, *Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Kabupaten Sukabumi* (Jakarta: MAARIF Institute, 2017).

Laporan Penelitian, *Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Kota Denpasar* (Jakarta: MAARIF Institute, 2017).

Laporan Penelitian, *Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Kota Surakarta* (Jakarta: MAARIF Institute, 2017).

Laporan Penelitian, *Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Kota Padang* (Jakarta: MAARIF Institute, 2017).

Laporan Riset, *Pemetaan Radikalisme di SMU Negeri* (Jakarta: MAARIF Institute, 2011).

Ringkasan Eksekutif Penelitian, *Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan* (Jakarta: MAARIF Institute, 2017).

Ringkasan Eksekutif Penelitian, *Policy Development for Improving Student Council (OSIS) at High School Level* (Jakarta: MAARIF Institute, 2017).

## **Wawancara dan FGD**

Pernyataan Eki, Ketua OSIS SMAN 1 Kab. Cirebon, dalam FGD di Kab. Cirebon, 23 November 2017.

Pernyataan salah seorang siswi beragama Islam, dalam FGD di Kota Denpasar, 19 November, 2017.

Wawancara dengan Afifah, Guru PAI SMAN 6 Surakarta, 13 Oktober 2017.

Wawancara dengan Agung Wijayanto, Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta, 20 Oktober 2017.

Wawancara dengan Anya, Anggota Roket dan Hanifa, Anggota Rohis SMAN 6 Surakarta.

Wawancara dengan Ida Bagus Ngurah, Kepala Sekolah SMAN 8 Denpasar, 13 Oktober 2017.

Wawancara dengan Imron, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, 16 Oktober 2017.

Wawancara dengan Koidah, Guru PAI dan Mantan Pembina Rohis SMAN 1 Plumbon Cirebon, 6 dan 10 Oktober 2017.

Wawancara dengan Maulana, Guru Sosiologi dan Pembina Paskibraka SMAN 1 Jamblang Cirebon, 6 Oktober 2017.

Wawancara dengan Slamet Budiyo, Kepala Sekolah MAN 2 yang juga merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah MAN 1 Surakarta, 12 Oktober 2017.

Wawancara dengan Sri Widodo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 3 Surakarta, 17 Oktober 2017.

Wawancara dengan Stephanus, Kepala Sekolah SMA Lentera

Harapan Tomohon, 12 Oktober 2017.

Wawancara dengan Taufiq, Kepala Sekolah MA Mardhatillah Tomohon, 3 Oktober 2017.

Wawancara dengan Trisan, Ketua OSIS SMA Kristen 1 Tomohon, 6 Oktober 2017.

## **Online**

Afrianty, Dina, "Indonesia's Islamic Educational Institutions and Radicalism among Muslim Youth", makalah disampaikan pada Seminar Asian Law Centre/Centre for Islamic Law and Society di the University of Melbourne. Makalah ini diunduh pada 20 Juni 2017 di tautan [http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/Afrianty\\_web1.pdf](http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/Afrianty_web1.pdf)

Upaya Mengikis Intoleransi, Mempertebal Semangat Keberagaman. CONVEY Indonesia. <https://conveyindonesia.com/berita-actual/2017/11/17/upaya-mengikis-intoleransi,-mempertebal-semangat-keberagaman/>.

## PROFIL PENULIS

### **Muhd. Abdullah Darraz**

Merupakan Direktur Eksekutif MAARIF Institute sejak 2017. Masa pendidikan menengahnya ditempuh di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut (1996-2002). Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2006). Gelar Master ia dapatkan dari The Islamic Collage-Universitas Paramadina Jakarta dengan konsentrasi Filsafat Islam. Semasa remaja, pernah aktif di Ikatan Remaja Muhammadiyah dari tingkatan ranting hingga wilayah. Sejak mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Cabang Jakarta Selatan (2003-2006), menjadi Koordinator Presidium Korps Pengader Cabang HMI Cabang Jakarta Selatan (2004-2006), dan menjadi Direktur Epistema (2005), lembaga riset dan kajian HMI Cabang Jakarta Selatan. Menjadi peneliti pada Center for Islamic Philosophical Studies and Information (CIPSI) pada periode 2006-2009. Sejak 2009 bergabung di MAARIF Institute dan menjadi direktur program Divisi Islam for Justice pada 2011-2016. Ia meraih beasiswa penghargaan pada program “Understanding Contemporary Terrorism and Developing Policy Responses Short Term Award” dari Australia Award pada 2017-2018. Pada periode 2015-2020 tercatat sebagai anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beberapa karya filsafat yang pernah diterjemahkan diedit olehnya adalah Kitab Rasail Ikhwan al-Safa (2008), Kitab al-Syifa karya Ibn Sina (2009). Karya lain yang ia tulis dan edit adalah Islam Peduli Lingkungan (2011), Fikih Kebinekaan (2015), dan Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah dan Terorisme (2017) sebagai editor dan kontributor. Dapat dihubungi melalui alamat email: [darraz.sophy@gmail.com](mailto:darraz.sophy@gmail.com)

## **Zuly Qodir**

Dosen Fisipol Umy, Pascasarjana UMY, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UII Yogyakarta, Peneliti Senior MAARIF Institute. Saat ini sebagai Tenaga Ahli Utama UKP Pancasila. Menulis lebih dari 400 artikel di koran nasional dan lokal. Menulis di jurnal ilmiah lebih dari 50 tulisan. Melakukan penelitian tentang radikalisme agama, politik identitas dan pluralisme agama. Menulis buku Sosiologi Agama (2009), Islam Liberal di Indonesia (2010), Gerakan Sosial Islam (2011), Sosiologi Politik Islam (2012), Radikalisme Agama (2014), Islam Non Mainstream (2015), Teori dan Praktek Politik Indonesia (2016), serta Sosiologi Pemerintahan (2017).

## **PROFIL EDITOR**

### **Pipit Aidul Fitriyana**

Menyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Merampungkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Tafsir Hadits. Kontributor buku Capruk for The Soul #1 (2011). Editor buku Berani Korupsi itu Memalukan (2013) dan Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah (2018). Beberapa tulisannya dimuat di jurnal serta media online dan cetak, lokal dan nasional. Koordinator Peneliti "Penguatan Institusi Sekolah melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan" (2017). Koordinator Program CONVEY Indonesia-MAARIF Institute (2017-2018). Bergabung di MAARIF Institute pada Divisi Islam for Justice sejak 2011. Surat elektronik di [aidulfitriyana@gmail.com](mailto:aidulfitriyana@gmail.com).

## PROFIL

### MAARIF INSTITUTE FOR CULTURE AND HUMANITY

Statuta pendirian MAARIF Institute *for Culture and Humanity* (2002) menyatakan komitmen dasar lembaga ini sebagai gerakan kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Tiga area ini merupakan hal pokok dan terpenting dalam perjalanan intelektualisme dan aktivisme Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mantan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).

Keberadaan MAARIF Institute merupakan bagian tidak terpisahkan dari jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI) yang ada di Indonesia dewasa ini. Gerakan pembaruan merupakan sebuah keniscayaan sekaligus tuntutan sejarah. Kompleksitas masalah kemanusiaan modern berikut isu-isu kontemporer yang mengikutinya seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, gender, dialog antar-agama dan peradaban serta sederet isu lainnya menuntut pemahaman dan penjelasan baru dari ajaran Islam.

Disadari pula bahwa program serta aktivitas MAARIF Institute tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sosiologis persyarikatan Muhammadiyah, meskipun tidak ada hubungan structural dengan organisasi ini dan tanpa mengurangi komitmen untuk terus memperluas radius pergaulan lembaga. Muhammadiyah, menurut banyak kalangan, sering dianggap sebagai representasi gerakan modernis-moderat di Indonesia yang aktif mempromosikan pemikiran-pemikiran Islam, berdakwah, dan melakukan aksi-aksi sosial. Oleh karena itu, memperjuangkan arus pembaruan pemikiran Islam dalam konteks gerakan Muhammadiyah merupakan perhatian utama MAARIF Institute sebagai bagian dari upaya pencerahan sekaligus memperkuat elemen moderat (*empowering moderates*) di Indonesia.





Enhancing the Role of Religious Education in  
Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan,  
Banten 15419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com)

Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.  
Resilient nations.*